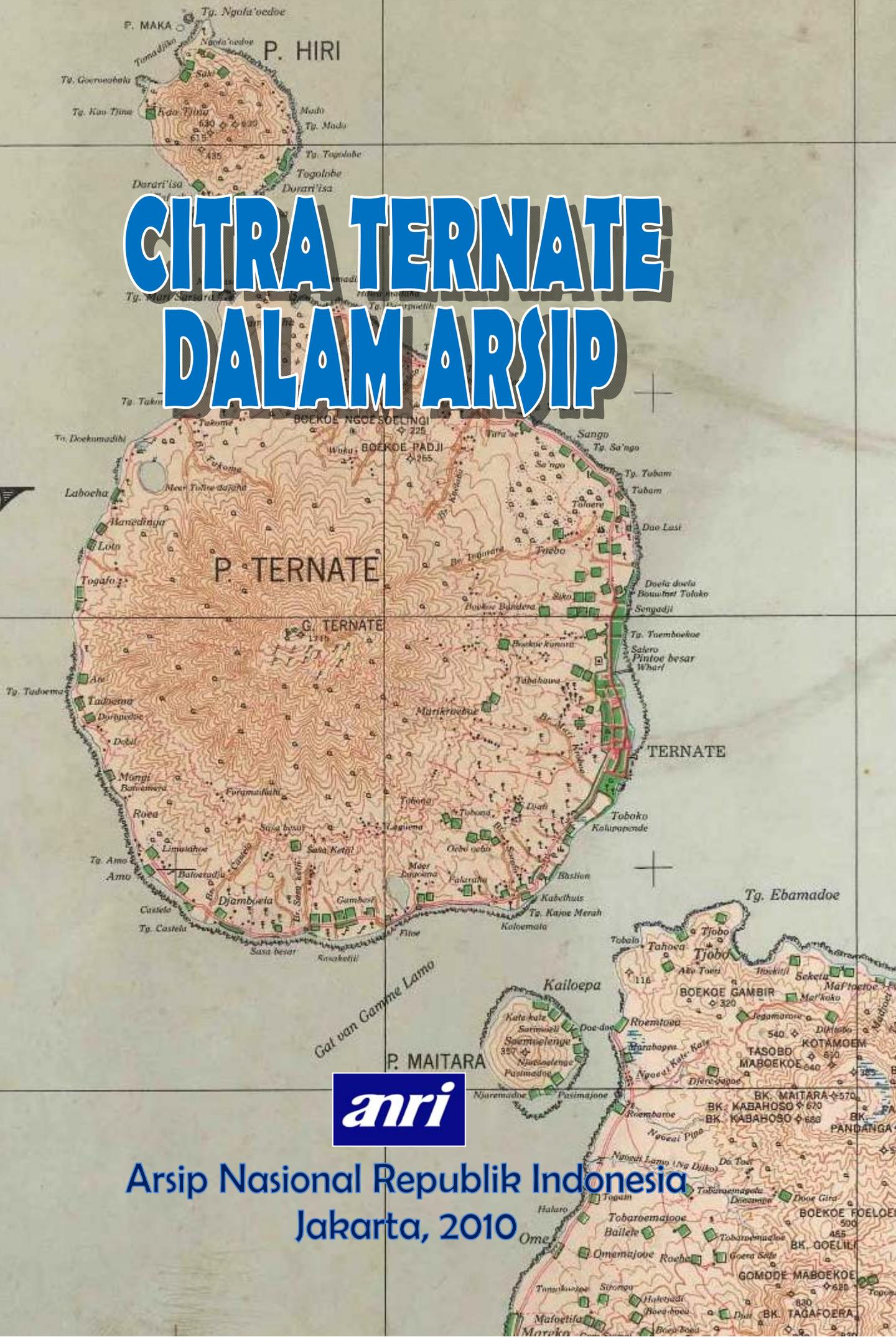


CITRA TERNATE DALAM ARSIP

Y



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, 2010

CITRA TERNATE DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia
Jakarta, 2010



Lambang Pemerintah Kota Ternate



Drs. H. Syamsir Andili
Walikota Ternate
Periode 2005-2010



Drs. H. Amas Dinsie
Wakil Walikota Ternate
Periode 2005-2010

WALIKOTA TERNATE 1946-2010



M.A.M. Soleman
Walikota



Dano Umar Saifuddin
Walikota



Van Abubakar Wesplat
Walikota



Jasin Bopeng
Walikota



Drs. Thaib Armaiyn
Walikota Administratif
1982-1991



Drs. Muhammad Hassan
Walikota Administratif
1991-1995



Drs. Syamsir Andili
Walikotamadya DT II,
1995-1999



Drs. H. Syamsir Andili
Walikota, 2000-2005



Drs. H. Syamsir Andili
Walikota, 2005-2010

WAKIL WALIKOTA TERNATE 2000-2010



Drs. H. Iskandar M. Djae
Wakil Walikota Ternate
Periode 2000 – 2005



Drs. H. Amas Dinsie
Wakil Walikota Ternate
Periode 2005 – 2010

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Kota Ternate merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Perjalanan sejarah Kota Ternate hingga menjadi salah satu Pemerintah Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang kemudian disusunlah dalam suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun di tengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif baik terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan.

Perlu disampaikan di sini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Bersama ini pula, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono M.Hum. atas koreksi dan saran perbaikan naskah citra daerah ini.

Jakarta, 19 April 2010

Plt. Kepala,

M. Asichin

DAFTAR ISI

Halaman Judul_____	i
Lambang Pemerintah Kota Ternate _____	ii
Foto Wali Kota Ternate 2005-2010_____	iii
Foto Wakil Wali Kota Ternate 2005-2010_____	iv
Foto Wali Kota Ternate 1946-2010_____	v
Foto Wakil Wali Kota Ternate 2000-2010_____	vi
Sambutan Kepala ANRI_____	vii
Daftar Isi_____	ix
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang_____	2
B. Letak Geografis_____	3
C. Perkembangan Sejarah Kota Ternate_____	4
1. Periode Sebelum Kolonial_____	4
2. Periode Kolonial Bangsa Eropa_____	8
3. Periode Pendudukan Jepang _____	16
4. Periode Kemerdekaan Republik Indonesia_____	17
D. Kota Ternate dalam Khasanah Arsip_____	20
Daftar Pustaka_____	21
CITRA TERNATE DALAM ARSIP _____	22
Geografis_____	23
Kesultanan Ternate_____	33
Pemerintahan_____	49
Pertahanan dan Keamanan_____	89
Keagamaan_____	97
Kebudayaan _____	104
Pendidikan_____	116
Perkebunan_____	127
Bangunan_____	132
Perhubungan_____	150
DAFTAR ARSIP CITRA TERNATE DALAM ARSIP _____	161
PENUTUP _____	177

Pendahuluan

CITRA TERNATE DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), kebangsaan (*nasionalitas*) dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan mencerminkan keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dalam penerapan otonomi daerah yang berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu, Daerah perlu diberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan OTDA melalui Program Citra

Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu Pemerintah Kota yang akan menerima Citra Daerah pada tahun 2010 ini adalah Kota Ternate.

Arsip Kota Ternate yang terekam dalam khasanah ANRI yang terdapat dalam naskah **Citra Ternate dalam Arsip** tersebut mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Ternate pada periode tersebut. Citra Ternate Dalam Arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Kota Ternate pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. LETAK GEOGRAFIS

Berdasarkan letak geografis, Kota Ternate berada pada 124°-129° Bujur Timur serta 3° Lintang Utara - 3° Lintang Selatan. Wilayah Kota Ternate sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Laut Maluku, dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera.

Kota Ternate mempunyai luas wilayah daratan 250,85 km² dan memiliki 8 buah pulau yang terbentang di atas 5.544,55 km² wilayah perairan. Pulau-pulau tersebut terdiri dari Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Hiri, dan 3 pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, yaitu Pulau Maka, Pulau Mano, dan Pulau Gurida.

Secara Administrasi Pemerintahan, Kota Ternate terdiri dari 4 Kecamatan dan 60 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Kota Ternate Utara membawahi 18 kelurahan dengan luas wilayah 40,275 km²
2. Kecamatan Kota Ternate Selatan membawahi 19 kelurahan dengan luas wilayah 93,975 km²
3. Kecamatan Pulau Ternate membawahi 17 kelurahan dengan luas wilayah 5432,5 km²

4. Kecamatan Moti membawahi 6 kelurahan dengan luas wilayah 228,6 km².

C. PERKEMBANGAN SEJARAH KOTA TERNATE

1. Periode Sebelum Kolonialisme

Berdasarkan catatan sejarah, Ternate merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Hal ini terbukti dalam catatan sejarah di mana nama Ternate tertulis dalam Kitab *Negarakertagama* karangan Mpu Tantular.

Komunitas masyarakat di Ternate sendiri sebenarnya muncul sejak tahun 1250, saat terjadi eksodus besar-besaran rakyat Halmahera ke berbagai pulau di bagian barat Halmahera, termasuk ke pulau Ternate yang kemungkinan disebabkan pertikaian politik. Orang-orang yang mendarat di Ternate kemudian mendirikan pemukiman di dekat puncak gunung Gamalama yang diberi nama **Tobona**.

Komunitas Tobona dikepalai seorang pimpinan yang disebut **Momole**, dan inilah awal masa kekuasaan Momole di Ternate sebagai masa pra-Kolano. Momole yang mengepalai pemukiman Tobona bernama **Guna**. Namun, karena para pelarian politik terus bermigrasi ke Ternate, terbentuklah pemukiman-pemukiman baru, masing-masing **Foramadiahi** (sekitar 1254) yang dipimpin Momole **Molematiti**, kemudian **Sampala** yang dipimpin Momole **Ciko**, serta **Gamlamo**. Berbeda dengan Tobona, tiga pemukiman terakhir dibangun di dekat laut.

Pada 1257, komunitas Tobona mengambil prakarsa mengadakan suatu musyawarah. Musyawarah tersebut kemudian mengambil keputusan untuk mengangkat Ciko - Momole komunitas Sampala - sebagai pemimpin komunitas-komunitas di Ternate. Dari pemilihan ini, lahirlah Kerajaan Ternate raja pertamanya Ciko. Setelah menjadi Raja Ternate, Ciko mengubah namanya menjadi **Kaicil Mashur Malamo**, dan Momole diganti dengan nama **Kolano** yang bermakna "raja". Peristiwa ini mengawali era Kolano di Ternate. Ibukota kerajaan ditetapkan berada di Sampala. Ciko berkuasa hingga 1272.

Setelah Kaicil Mashur Malamo (1257-1272), Kolano Ternate dijabat oleh **Kaicil Jamin** (1272-1284) dan **Kaicil Siale**

(1284-1298). Pada masa Siale, ibukota kerajaan dipindahkan dari Sampala ke Foramadiahi. Setelah itu, Siale digantikan secara berturut-turut oleh **Kamalu** (1298-1304) dan **Kaicil Ngara Malamo** (1304-1317).

Di bawah Ngara Malamo, Ternate memulai ekspansi teritorialnya. Politik ekspansi inilah yang mengantarkan Ternate menjadi kerajaan paling besar, paling kuat dan paling berpengaruh dalam jajaran kerajaan-kerajaan Maluku pada masa-masa selanjutnya, terutama dari akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-16. Namun, memasuki abad ke-16, pamor Ternate sebagai kerajaan paling tangguh mulai merosot.

Ngara Malamo, peletak dasar politik ekspansi Kerajaan Ternate, digantikan **Patsyaranga Malamo** (1317-1322), menyusul **Sidang Arif Malamo** (1322-1331). Pada masa kekuasaan Sidang Arif Malamo, Ternate, Tidore, dan Bacan mulai didatangi pedagang-pedagang manca negara seperti Cina, Arab dan Gujarat. Di samping itu datang juga pedagang nusantara dari Jawa dan Malaka. Para pedagang ini juga mulai menetap, dan perdagangan rempah-rempah terutama di Ternate, Tidore dan Makian mulai ramai. Sesudah Ternate, Pelabuhan Makian menjadi pelabuhan dagang yang terkemuka ketika itu di Maluku.

Dengan memperhatikan nama sejumlah tempat di Maluku yang menggunakan kosa kata Cina, seperti Batu Cina di wilayah Jailolo dan Air Mata Cina di Ambon, dapat dikemukakan dugaan bahwa orang Cina telah berdagang rempah-rempah serta mengunjungi Ambon, Banda dan Maluku Utara jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing lainnya. Karena berlipat gandanya keuntungan perniagaan rempah-rempah, para pedagang Cina menyembunyikan informasi mengenai negeri asal rempah-rempah tersebut. Indikasi ini juga menunjukkan bahwa sejak awal abad masehi, India dan Timur Tengah serta sejumlah pelabuhan dagang Eropa di Laut Tengah telah memperdagangkan rempah-rempah yang berasal dari para pedagang Cina.

Sebuah peristiwa bersejarah penting yang terjadi pada masa pemerintahan Sidang Arif Malamo adalah prakarsanya untuk menyelenggarakan pertemuan **Moti** pada 1322. Pertemuan ini melahirkan keputusan-keputusan yang intinya

adalah peredaan ketegangan antar kerajaan-kerajaan di Maluku, penyeragaman bentuk-bentuk kelembagaan kerajaan, dan penentuan peringkat kerajaan peserta musyawarah. Jailolo ditetapkan sebagai kerajaan yang menempati peringkat pertama dalam senioritas, menyusul Ternate, Tidore dan Bacan. Delegasi Bacan memprotes keputusan ini dan meminta diberi hak atas peringkat pertama, berdasarkan pertimbangan dari segi silsilah bahwa Raja Bacan berasal dari putera tertua. Peserta pertemuan lainnya menolak keberatan Bacan tersebut dengan menyatakan bahwa penempatan Jailolo pada urutan pertama bukan didasarkan pada silsilah, tetapi pada senioritas: Jailolo merupakan kerajaan pertama yang berdiri di Maluku mendahului tiga kerajaan lainnya.

Sisi positif pertemuan ini adalah sejak 1322 Maluku mengalami masa damai dan aman dari berbagai intrik politik dan permusuhan. Ia telah berhasil meredam untuk sementara waktu ambisi-ambisi ekspansif para anggotanya. Demikian pula, ancaman-ancaman militer terutama dari dua kerajaan terbesar serta terkuat secara politik dan militer, tetapi saling bersaing yakni Ternate dan Tidore, berkurang secara drastis.

Rakyat keempat kerajaan tersebut menikmati alam perdamaian dan keamanan selama lebih dari dua puluh tahun. Tetapi, masa ini segera sirna ketika Kaicil Tulu Malamo naik takhta di Ternate pada 1343. Secara sepihak Tulu Malamo (1334-1347) membatalkan perjanjian Moti, dan menyatakan persekutuan yang diupayakan pendahulunya, Sidang Arif Malamo, tidak lagi mengikat bagi Ternate. Tindakan ini, tentu saja, mengundang reaksi keras tiga kerajaan lainnya.

Pernyataan pembatalan perjanjian Moti didahului dengan serbuan penguasa Ternate, **Syah Alam** (1332-1334), atas Makian dan menjadikannya sebagai wilayah Ternate. Sejak Makian terbuka sebagai bandar internasional bagi perdagangan rempah-rempah, ditambah potensi produksi rempah-rempahnya yang sangat besar, Ternate mulai mengincar daerah ini. Setelah Makian, giliran kepulauan Sula ditaklukkan oleh **Kolano Ngolo Macahaya** (1350-1375), pengganti **Bohiyat** atau **Abu Hayat** (1347-1350). Kemudian berbagai penaklukan dilakukan Ternate atas Maluku Tengah, Seram Barat dan Bum.

Di tengah kegiatan ekspansi, Ternate meninggalkan era kolano dan memulai era kesultanan semasa bertakhtanya Sultan pertama Ternate, **Zainal Abidin** (1468-1500). Gelar kolano ayang digunakan para pendahulunya diganti dengan gelar sultan. Ia memproklamasikan Islam sebagai agama resmi Kesultanan Ternate, dan lembaga baru dalam struktur kesultanan yakni **Jolebe** atau bobato yang terdiri dari ulama yang berjubah putih dengan para bawahannya, yang membantu sultan dalam urusan-urusan keagamaan Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas warna keislaman yang diinagurasinya. Struktur Kesultanan Ternate yang baru ini memiliki pengaruh yang menentukan terhadap kerajaan-kerajaan lainnya di Maluku. Struktur tersebut segera diadopsi Tidore, Bacan dan Jailolo, walaupun yang terakhir ini yakni Jailolo tetap mempertahankan gelar kolano sebagai titel penguasanya.

Aktivitas penaklukan Ternate yang paling spektakuler dilakukan oleh **Sultan Baabullah** (1570-1583), pengganti **Sultan Khairun** (1534-1570). Pada masa Baabullah, Kesultanan Ternate membentang dari Mindanao di utara sampai Bima di selatan, dan dari Makassar di barat sampai Banda di timur. Karena itu, Sultan Ternate terbesar ini dikenal sebagai penguasa atas 72 pulau yang seluruhnya berpenghuni.

Di masa Baabullah, Ternate tampil sebagai sebuah kesultanan paling berpengaruh baik dalam politik maupun militer di kawasan timur Indonesia. Bahkan, pada masa ini, ketiga kerajaan besar Maluku yang lain terlihat tidak berkutik. Baabullah, menurut sebuah sumber, mampu mengerahkan 90.700 tentara bila diperlukan. Kontributor terbesar di atas 10.000, pasukan ini adalah Veranulla dan Ambon (15.000 tentara), Teluk Tomini (12.000 tentara), Batu Cina dan sekitarnya termasuk Halmahera Utara (10.000 tentara), Gorontalo dan Limboto (10.000 tentara), serta Yafera (10.000 tentara). Penyumbang pasukan tersedikit adalah Moti dan Hiri, masing-masing 300 tentara.

Keberhasilan Sultan Baabullah tidak terlepas dari kecakapan sejumlah panglima dan komandan tentaranya, seperti **Kapita Laut Kapalaya** dan **Rubohongi**. Kapalaya adalah penakluk pantai timur Sulawesi, khususnya Buton, dan Rubohongi adalah

penakluk Maluku Tengah. Enam tahun setelah bertakhta, Baabullah telah menguasai pulau-pulau di Ambon, Hoamoal di pulau Seram, Buru, Manipa, Ambalau, Kelang dan Buano. Empat tahun setelah itu, Sultan terbesar Ternate ini juga telah menguasai desa-desa sepanjang pantai timur Sulawesi, Banggai, Tobungku, Buton, Tiboro dan Pangasani. Setelah itu, giliran Makassar dan Selayar datang ke Ternate. Tahun kedatangannya merupakan awal dari monopoli rempah-rempah Kompeni di Ternate.

2. Periode Kolonial Bangsa Eropa

Matelief De Jong bukanlah orang Belanda yang pertama kali datang di Ternate. Menurut catatan **de Clerq**, orang Belanda pertama yang tiba di Ternate adalah **Wijbrand van Warwijk**. Pada 2 Juni 1599, van Warwijk merapat di pelabuhan Talangame dengan kapal Amsterdam dan Utrecht. Setelah itu, datanglah secara berturut-turut **van Neck** pada 1601 dan **Wolphert Harmenzoon** pada 1602.

Kedatangan **Matelief de Jong** pada 1607 sebenarnya berdasarkan permintaan Ternate. Sebelumnya, atas perintah Dewan Mangkubumi Kesultanan Ternate pimpinan **Jogugu Hidayat, Kaicil Ali** dan **Kimalaha Aja** diutus ke Banten untuk meminta pertolongan Belanda. Pasalnya, orang-orang Spanyol di bawah pimpinan **Don Pedro da Cunha** menyerbu benteng Gamlamo dan menangkap Sultan Saidi beserta keluarganya, kemenakannya Kaicil Hamzah, serta sejumlah pejabat tinggi kesultanan, termasuk Sangaji Makian, Sahu dan Gamkonora. Kesemua tawanan ini diasingkan ke Manila pada 1606. Kaicil Ali yang ketika itu berusia 21 tahun dan Jogugu Hidayat berhasil meloloskan diri dalam peristiwa itu.

Setelah tiba di Ternate dan melakukan observasi seperlunya tentang kekuatan Spanyol, de Jong akhirnya setuju membantu Ternate dengan syarat, antara lain, Ternate memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Kompeni dan membolehkannya mendirikan benteng. Benteng yang didirikan itu kini dikenal sebagai **Benteng Oranje** terletak di pusat kota Ternate.

Tidak mudah bagi Ternate untuk melepaskan diri dari campur tangan kekuasaan asing Eropa. Ketika Portugis berkuasa di kesultanan ini, selain memperoleh hak monopoli dalam tata niaga rempah-rempah dan izin mendirikan benteng Gamlamo, ia juga ingin mencampuri urusan pemerintahan Ternate. Bahkan, sejak 1532, Portugis mulai berpartisipasi dalam proses pengangkatan sultan-sultan Ternate: mulai dari Boheyat, menyusul Tabariji, Khairun dan terakhir Baabullah. Keadaan ini baru berakhir setelah Portugis terusir. Tetapi, setelah Kompeni Belanda datang, campur tangan dalam pengangkatan Sultan Ternate juga menjadi salah satu kebijakannya. Mulai dari Mandarsyah, setiap pergantian Sultan Ternate harus dengan persetujuan Kompeni.

Mulai 1652, Ternate mengalami masa-masa sulit baik di bidang politik maupun militer. **Sultan Mandarsyah** ditekan secara halus untuk menandatangani perjanjian dengan Gubernur Jenderal VOC, Reinier, di Batavia. Perjanjian itu menentukan bahwa Kesultanan Ternate tidak boleh lagi mengangkat *salahakan* baru untuk kawasan seberang lautannya di Maluku Tengah, yakni di Hoamoal, dan daerah ini menjadi wilayah yang langsung berada di bawah pemerintahan Kompeni di Ambon. Ternate juga harus melaksanakan *hong*i (penebangan pohon-pohon cengkih) di daerah-daerah tersebut.

Latar belakang penandatanganan perjanjian di atas adalah ketidaksenangan Kompeni terhadap pejabat yang ditugaskan Kesultanan Ternate di sana. **Kaicil Majira**, yang diangkat Sultan Hamzah pada 1641 sebagai *salahakan* di Hoamoal atas desakan Kompeni Ambon untuk menggantikan Salahakan Luhu yang tidak disenangi, yang pada tahun 1651 melakukan pemberontakan bersenjata. Sultan Mandarsyah dinilai Kompeni tidak melakukan tindakan serius terhadap Majira untuk mengakhiri pemberontakannya. Di samping itu, sejak 1652, Kerajaan Buton mulai memusingkan Mandarsyah. Tentara Kerajaan Makassar melakukan infiltrasi dan menduduki beberapa pulau di sekitar Buton, yang diperburuk lagi oleh pengkhianatan sejumlah besar bobato Buton dengan memihak Makassar. Kapita Laut Kaicil Ali, beserta pasukannya yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Sanana dan Alifuru Jailolo, dengan susah payah mempertahankan pulau-pulau itu dari serangan Raja

Makassar. Usulan Kaicil Ali agar Mandarsyah meminta bantuan Kompeni ditolak, karena Mandarsyah yang permaisurinya seorang puteri Buton yakin bahwa ia masih memiliki pengaruh cukup kuat. Tetapi, realitasnya tidak demikian. Pengaruh Sultan Ternate ini telah merosot jauh di mata rakyat Buton.

Serangan Makassar yang semakin gencar terhadap Buton membuat hari-hari kejatuhan kawasan ini tinggal dihitung dengan jari. Dengan susah payah Kaicil Ali mencoba menghalau serangan itu, tetapi dalam suatu pertempuran mempertahankan ibukota Buton, Ali gugur di medan laga. Dengan gugurnya Ali, semakin kecil peluang Mandarsyah untuk mempertahankan pulau itu. Ia mengutus Kapita Laut Saidi untuk membangun kembali pertahanan Buton, dan dalam keadaan putus asa ia menghubungi Kompeni untuk meminta bantuan. Mandarsyah berhasil meyakinkan de Vlaming, Gubernur Kompeni Ambon, mengenai perlunya bantuan Kompeni guna menyelamatkan Buton yang tengah sekarat.

Pada September 1654, dengan menumpang kapal *Zas van Gent*, de Vlaming dan Mandarsyah menuju Buton. Yang mereka temukan di sana adalah sebuah kenyataan pahit: Raja Buton telah menjalin persekutuan dengan Makassar, dan baik rakyat maupun para bobato andalan Mandarsyah sebagian besar tidak lagi setia kepada Ternate. De Vlaming sendiri, setelah melihat kenyataan tersebut, meneruskan pelayarannya ke Makassar dan meninggalkan Mandarsyah di Buton.

Walaupun Raja Buton telah berkhianat, Mandarsyah mencoba mempertahankan Buton dengan mengumpulkan sisa-sisa bobato antara lain Hukum Lau serta Kaicil Lasinuru dan rakyatnya yang masih setia dalam suatu pertemuan. Ia meminta mereka mendobrak kepungan tentara Makassar dan mengusirnya keluar wilayah Buton. Tetapi, upaya terakhir Mandarsyah ini tidak membawa hasil. Dengan perasaan kecewa, Mandarsyah kembali ke Ternate dan tidak pernah lagi mengunjungi Buton hingga akhir hayatnya.

Beberapa saat setelah kepergian Mandarsyah, Kapita Laut Saidi tidak mampu lagi menahan lajunya serbuan Makassar dan jatuhlah Buton ke tangan Raja Makassar pada 1655. Dengan demikian, berakhirilah kekuasaan Ternate atas pulau itu selama hampir satu abad (1580-1655). Saidi dan pasukannya

mundur ke Tobungku, dan dari kejauhan Kapitan Laut ini menatap pulau yang ditinggalkannya itu dengan sedih.

Pada 1675, Sultan Mandarsyah wafat dan digantikan puteranya Sibori. Sebagaimana ayahnya, Sibori ternyata tidak dapat mempertahankan identitas Ternate dengan lebih baik. Di samping perangainya yang tidak baik, Sibori juga tidak mampu melepaskan diri dari tekanan-tekanan Kompeni.

Setelah penobatannya, Sibori mengutus pejabat kepercayaannya ke Batavia untuk berunding dengan Gubernur Jenderal Jaan Maatsuyker. Hasil perundingan secara praktis dan politis sangat merugikan Ternate. Perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1676 itu menetapkan, antara lain:

1. Wilayah seberang laut Kesultanan Ternate di kepulauan Ambon akan digabungkan ke dalam provinsi.
2. Akan diangkat penguasa-penguasa khusus di pulau Buru, Ambalau, Buano dan Kelang.

Setelah meratifikasi perjanjian ini, Sibori memperoleh tanda jasa dan bintang penghargaan dari Kompeni. Namun, bermula dengan Seram, kini Ternate kehilangan kontrolnya atas seluruh wilayah seberang lautnya di Maluku Tengah.

Sementara itu, lepasnya Buton dari kekuasaan Ternate telah membawa implikasi yang negatif bagi daerah-daerah kekuasaan Ternate lainnya di Sulawesi Utara dan sepanjang pantai timur pulau tersebut. Kepulauan Sangir Talaud, Gorontalo dan Limboto, Buol, Toli-toli, Inobonto, Moutong, Teluk Tomimi, Parigi dan lainnya, mulai memudar loyalitasnya kepada Kesultanan Ternate. Sibori menyadari benar kenyataan ini dan berupaya memulihkan kesetiaan wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu, ia mendekati Gubernur Maluku, Padtbrugge, guna meminta bantuan. Sebagai argumennya, Sibori merujuk perjanjian 1652 dan 1676, yang memuat penyerahan daerah seberang laut Kesultanan Ternate di Maluku Tengah kepada kekuasaan Kompeni di Ambon. Padtbrugge dapat menerima argumentasi Sibori dan berjanji akan memberikan bantuannya sebagai balas budi atas penyerahan wilayah tersebut.

Dengan bantuan Kompeni, Ternate menyerang Gorontalo dan daerah pesisir timur Sulawesi untuk memulihkan loyalitasnya kepada Ternate. Bahkan, pemulihan loyalitas Sangir Talaud diupayakan sendiri oleh Sibori tanpa bantuan Kompeni.

Untuk sementara, Ternate bisa berpuas diri karena berhasil memulihkan kesetiaan daerah-daerah tersebut kepadanya. Tetapi, loyalitas yang berhasil dipulihkan ini tidak setebal atau sekuat di masa kekuasaan Baabullah.

Abad ke-17 merupakan masa paling suram bagi Kesultanan Ternate dalam kaitannya dengan daerah-daerah taklukan. Satu demi satu daerah-daerah tersebut mulai melepaskan diri, dan di penghujung abad ini hingga awal abad ke-18, daerah seberang laut Kesultanan Ternate yang tersisa tinggal kepulauan Sanana dan Tobungku-Banggai.

Kompeni Belanda juga dapat dihitung sebagai salah satu kontributor yang menyebabkan terpuruknya Kesultanan Ternate. Dengan berbagai perjanjian bilateral yang dibuatnya dengan Ternate, para sultan Ternate yang tidak berdaya itu baik secara halus maupun kasar ditekan untuk menyetujui konsep-konsep yang di satu pihak mengukuhkan kekuasaan Kompeni, tetapi di pihak lain menempatkan Ternate dalam posisi dilematis serta hampir tidak ada bantuan.

Selama abad ke-18, kondisi Ternate tidak banyak mengalami perubahan berarti. Sebagai mitra, Ternate dipandang cukup baik oleh Kompeni dibandingkan kesultanan-kesultanan tetangga lainnya, yakni Tidore dan Bacan. Ternate mempunyai prestasi bagus dalam menjalankan *hongji tochten*, yang nota bene seluruhnya untuk kepentingan Kompeni. Dalam pandangan Kompeni, Ternate adalah sahabat yang bisa diandalkan. Hal ini bisa dilihat pada *acte van investiture* yang dikeluarkan di Batavia pada 17 Juli 1780 dan ditandatangani di benteng Oranje, di mana Kompeni mengeritik dan membenahi sikap kurang bersahabat Tidore serta Bacan, sementara Ternate mendapat pujian atas kerjasamanya dengan Kompeni.

Pada akhir abad ke-18, Kompeni membalas jasa orang-orang Ternate dengan menganugerahkan penghargaan kepada Jogugu Sabtu dan Marsaoli Patuseranga. Keduanya, secara berturut-turut,

Pada 21 Juni 1801, Gubernur Cransen menyerahkan Maluku kepada Inggris. Penyerahan ini dilakukan di Ternate. Selanjutnya, Inggris menempatkan residen yang dianugerahkan pangkat mayor dan kapten perang, serta masing-masing memperoleh bintang perak bergambar singa emas di tengahnya,

yang dilingkari sebuah karangan bunga berwarna emas, dengan tulisan: "Kesetiaan Ternate dalam tahun 1800." Namun demikian, Inggris tidak lama berkuasa di Ternate. Pada 1803, Inggris menyerahkan kembali Ternate kepada Belanda. Sebuah komisi untuk pengambilalihan dan restabilisasi residensi di wilayah timur, yang dikepalai Cransen, tiba di Ternate pada Agustus 1803 untuk melaksanakan tugasnya.

Pada 1804, Peter Adrianus Goldbach ditetapkan sebagai Gubernur Maluku, dan pada tahun berikutnya ia digantikan oleh Carel Lodewijk Wieling. Pada masa ini, Maluku untuk sementara waktu disubordinasikan ke Ambon.

Pada 1807, Muhammad Ali dinobatkan sebagai Sultan Ternate, menggantikan Sultan Muhammad Yasin yang mangkat dalam tahun ini. Ternate kemudian menandatangani sebuah perjanjian dengan Belanda di benteng Oranje pada 16 Mei 1807. Dalam Pasal 14 perjanjian tersebut disebutkan: "Sultan dan pembesar-pembesar Kerajaan (Ternate — pen.) akan tetap setia kepada pelindung mereka, Pemerintah Hindia Timur Belanda." Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 1810, Belanda kembali menyerahkan Maluku kepada Inggris di bawah Kapten Tucker. Tahun berikutnya, Inggris mengangkat Kapten Forbes sebagai komandan militer dan kepala pemerintahan sipil, yang kemudian diganti oleh W. Ewer dalam jabatan residen "untuk seluruh urusan Maskapai India Timur (*East India Company*) di Maluku."

Selama 1813-1816, Inggris menempatkan beberapa residen di Ternate, yaitu W.G. MacKenzie, W.B. Martin, R. Stuart, dan setelah itu mengangkat kembali W.G. MacKenzie untuk jabatan yang sama. Kembalinya MacKenzie menjabat Residen Maluku di Ternate menandai berakhirnya masa pemerintahan Inggris yang relatif singkat di Maluku. Dengan surat keputusan Komisaris Penyerahan Kekuasaan Kepulauan Maluku, tertanggal 5 April 1817, telah diangkat komisaris untuk pengambilalihan Ternate dan daerah taklukannya, yang dijabat oleh Letnan Kolonel J. Graat, Komandan Fregat Maria Reigensbergen, dan J.A. Neijs, administrator di Ambon. Keduanya tiba di Ternate pada 24 April 1817, dan 30 April 1817 dan melakukan pengambilalihan Ternate dari Residen

MacKenzie. Pada 1818, J.A. Nijs diangkat sebagai Residen Maluku yang pertama.

Sejak itu, Kota Ternate menjadi pusat pemerintahan *Gouvernement de Molukken*. Kota Ternate menjadi ibukota *Afdeling Noord Molukken*, yang dipimpin oleh seorang Asisten Residen yang membawahi 7 *onderafdeling*, yaitu:

1. *Onderafdeling* Ternate
2. *Onderafdeling* Jailolo
3. *Onderafdeling* Tobelo
4. *Onderafdeling* Tidore
5. *Onderafdeling* Weda
6. *Onderafdeling* Bacan
7. *Onderafdeling* Sanana

Sementara itu, pemerintahan Kota Ternate dibagi menjadi dua wilayah, yaitu:

1. Wilayah Ternate Utara dengan pemerintahan tidak langsung di bawah swapraja (*Zelf Bestuur Gebied*)
2. Wilayah Ternate Selatan dengan pemerintahan langsung di bawah pemerintahan Belanda (*Gouvernement Gebied*).

Setelah penandatanganan Traktat London pada 1824, Pemerintah Belanda melakukan reorganisasi pemerintahan, Negara membubarkan Provinsi Ambon dan Maluku. Sebagai gantinya, dibentuk Provinsi Kepulauan Maluku yang terdiri dari beberapa afdeling. Maluku Utara (sebelumnya: Maluku) ditetapkan sebagai salah satu afdeling. Afdeling Noord Molukken (Maluku Utara) adalah "Ternate en onderhorigheden" (Ternate dan daerah taklukannya), yang hanya terdiri dari Halmahera Utara dan Barat, Kepulauan Sula, Pulau-pulau dalam kelompok Banggai, beberapa daerah swapraja kecil di pantai timur Sulawesi yaitu Bolante, Mindong, Tomeiki dan Tombuku serta Ternate sendiri. Reorganisasi ini tidak hanya menyangkut Ternate, tetapi juga dialami oleh Tidore, Bacan dan sejumlah besar kerajaan lainnya di Indonesia.

Reorganisasi pemerintahan oleh Belanda juga didasarkan pada persetujuannya dengan Ternate dan Tidore pada 1817. Dalam persetujuan ini, antara lain, dinyatakan:

1. Kesultanan Ternate dan Tidore mengakui kekuasaan tertinggi dan kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku atas kedua kesultanan tersebut.
2. Kedua kesultanan itu menyatakan seluruh wilayah kesultanan mereka menjadi wilayah Pemerintah Hindia Belanda, dan berjanji untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda bila terjadi perang dengan menyediakan sarana dan personil secara bersama-sama.
3. Kedua kesultanan itu berjanji tidak akan membuat perjanjian atau perikatan apapun tanpa izin Pemerintah Hindia Belanda, dan keduanya tidak akan membuat peraturan-peraturan perdagangan dalam negeri, tetapi harus mengacu kepada peraturan-peraturan serupa yang telah dibuat Pemerintah Hindia Belanda.
4. Kedua kesultanan itu mengakui hak-hak Pemerintah Hindia Belanda atas pegawai-pegawai pribumi yang berada di bawah kewenangan sultan. Dalam keadaan darurat, sultan harus membantu Pemerintah Hindia Belanda dengan tenaga dan sarana yang diperlukan.

Perjanjian ini dibuat di benteng Oranje pada 3 Mei 1817 oleh Gubernur Jenderal van der Cappelen dan Sultan Muhammad Ali dari Ternate serta Sultan Muhammad Tahir dari Tidore. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut, Ternate dan Tidore resmi menjadi kesultanan dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah atau Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan kemerdekaan serta kedaulatan keduanya pun berakhir.

Makna penting Ternate, sejak kesultanan ini berada di bawah VOC hingga bubarnya perusahaan dagang tersebut, adalah bahwa kesultanan ini pernah mencatat prestasi sebagai tempat kedudukan tiga gubernur jenderal pertama VOC, masing-masing Pieter Both (1610-1614), Gerard Reynst (1614-1615), dan Dr. Laurens Reael (1616-1619).

Di pulau yang kecil seperti Ternate telah terjadi peristiwa-peristiwa besar selama tiga abad (1500-1800) dalam sejarah rempah-rempah Maluku. Sejarah Ternate juga mencatat peristiwa-peristiwa besar lainnya yang menentukan eksistensi penjajahan sebuah kekuasaan asing besar pada zamannya, yaitu masuk dan terusirnya Portugis dari Maluku, berbagai pertarungan perebutan kekuasaan asing Portugis, Spanyol dan

Belanda. Di samping itu, persaingan politik lokal khususnya antara Ternate dan Tidore juga menghiasi lembaran sejarah Ternate.

Berbagai keputusan regional penting yang bersejarah bagi VOC selama hampir dua abad (1607-1800) dilahirkan di Ternate. Namun demikian, juga dapat disaksikan banyak tragedi sejarah yang dipentaskan di pulau kecil ini. Beberapa penguasa Ternate telah merobohkan salah satu dari keempat pilar Maluku dengan dilikuidasinya Kerajaan Jailolo. Barangkali tepat gelar yang diberikan kepada Ternate sebagai "Maluku ma-kolano" (penguasa Maluku).

3. Periode Pendudukan Jepang

Pada saat perang Asia Pasifik terjadi, wilayah-wilayah pendudukan bangsa Eropa di Asia bagian Timur dan Tenggara diserbu bala tentara Jepang, termasuk wilayah pendudukan Belanda di Indonesia. Bangsa Jepang pertama kali memasuki wilayah Timur Indonesia pada tanggal 10 Januari 1942 melalui Tarakan Kalimantan Timur. Jepang melanjutkan serangannya ke wilayah Sulawesi dan Maluku.

Jepang segera mengubah susunan pemerintahan yang ada. Berdasarkan *Osamu Seirei* No. 27 tahun 1942 ditetapkan bahwa *Shu* (*provinsi*), sebagai wilayah pemerintahan tertinggi. Di bawah *shu* terdapat *ken* (kabupaten) dan *si* (kotapraja), sementara itu di bawah *ken* adalah *gun* (kawedanaan) dan di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), yang paling bawah adalah *ku* (desa). Pada tahun 1944 Jepang memperkenalkan *tonarigumi* (rukun tetangga) yang beranggotakan 10 hingga 20 kepala keluarga dengan seorang pemimpin.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Ternate dipimpin oleh seorang *Minseibu* yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut (*Kaigun*) Armada Selatan Kedua bersama dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut hangat oleh rakyat Indonesia, karena diharapkan dapat membawa perbaikan sebagaimana propaganda yang dilancarkan oleh Jepang sebelumnya. Jepang memberikan kesempatan kepada rakyat

untuk mengadakan rapat umum di lapangan terbuka dengan mengibarkan bendera Merah Putih.

Namun demikian, harapan itu ternyata segera pupus, karena sikap Jepang yang keras dan kejam. Organisasi pergerakan rakyat ditekan, dilarang mengadakan kegiatan, dan bahkan dibubarkan. Kegiatan masyarakat hanya diijinkan berlangsung melalui badan atau organisasi yang didirikan Jepang, seperti *Seinendan* untuk para pemuda dan *Fujinkai* untuk kaum wanita. Banyak rakyat yang dihukum tanpa melalui proses pengadilan. Demikian pula harta benda rakyat diambil secara paksa untuk kepentingan perang. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat yang sudah menderita menjadi semakin berat. Dibentuknya *Giyugun* maupun ***Pembela Tanah Air (Peta)*** semata-mata hanyalah untuk membantu Jepang dalam perang untuk menguasai Asia Timur Raya. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah tak bersyarat kepada Sekutu pada bulan Agustus 1945.

Keadaan Ternate pada saat pendudukan Jepang walaupun tidak banyak catatan sejarah yang mengungkapkannya, namun situasinya tidaklah jauh berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kesengsaraan rakyat Indonesia berlangsung sampai pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan.

4. Periode Kemerdekaan Republik Indonesia

Ketika Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia melepaskan diri dari penjajahan, Wilayah Maluku memasuki babak baru dalam kehidupan pemerintah. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ternate berada dalam wilayah Maluku dan sebagai Gubernur diangkatlah Mr. J. Latuharhary.

Namun, sebelum pemerintah melakukan penataan dalam struktur dan organisasi pemerintahan, khususnya Maluku, usaha Belanda untuk menguasai Indonesia kembali terjadi. Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia, ternyata diikuti oleh tentara ***Netherlands Indies Civil Administration (NICA)***, yang berusaha mendirikan pemerintahannya kembali. Untuk mengukuhkan kekuasaannya, pada bulan Januari 1946, NICA/

pemerintah kolonial Belanda mengusahakan pembentukan negara-negara yang bersifat kedaerahan yang nantinya akan menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Pada saat itu, Kota Ternate berstatus Karesidenan Ternate dengan wilayahnya yang mencakup Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau-pulau Batang Dua. Pada saat itu Distrik Ternate diperintah oleh 3 Residen secara bergiliran, yaitu:

1. Residen **Iskandar Mohammad Djabir Syah** (Sultan Ternate) 1945-1951;
2. Residen **Zainal Abidin Syah** (Sultan Tidore) 1951-1957;
3. Residen **Dede Muchsin Usman Syah** (Sultan Bacan) 1957-1958.

Berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 3.S.1946 No.27 Tanggal 9 April 1946, pada tanggal 10 Desember 1946 Residen Ternate membentuk Kotapraja (*Stadsgemeente*) Ternate, dengan Dewan Kotapraja (*Gemeenteraad*) beranggotakan 10 orang. Kotapraja Ternate dipimpin seorang Walikota, dan untuk pertama kali dijabat oleh **M.A.M. Soleman** yang merangkap sebagai Ketua Dewan Kota. Kemudian walikota dijabat berturut-turut oleh: **Dano Umar Saifuddin, Hien Diao, Van Abubakar Wesplat,** dan **Jasin Bopeng**. Sementara itu, mayoritas keanggotaan Dewan Kota dipegang oleh pribumi, menyusul dua orang turunan Cina, dan satu orang keturunan Belanda. Dewan Kota juga bertindak sebagai Penasehat Walikota dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pada tahun 1957, terbentuk DPRD Gotong Royong Maluku Utara, menggantikan Dewan Kotapraja Ternate. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku, Kotapraja Ternate dibubarkan, dan statusnya diturunkan menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh **Jasin Bopeng**, mantan Walikota Ternate. Meskipun demikian, Kecamatan Ternate masih tetap berstatus Kotapraja, sampai keluarnya Keputusan Gubernur Maluku tanggal 30 Maret 1965, yang mengakhiri status Kotapraja Ternate dan menjadi Kecamatan.

Pada tahun 1979, Departemen Dalam Negeri mengadakan serangkaian survei dalam rangka Pengumpulan Data Rencana

Kota Seluruh Indonesia. Survei ini menghasilkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 135/PUOD Tahun 1979 tentang Peningkatan Status Kotapraja Ternate menjadi Kota Administratif. Berdasarkan Keputusan tersebut Bupati Maluku Utara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Kota Administratif Ternate. Pada tanggal 11 Maret 1981 Ternate resmi menjadi Kota Administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981. Jabatan Walikota Administratif sampai tahun 1999, yaitu:

1. Periode 1982-1987 dan 1987-1991: Drs. Thaib Armayn
2. Periode 1991-1995 : Drs. Muhammad Hasan
3. Periode 1995-1999 : Drs. Syamsir Andili

Pada 7 Desember 1996, Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili mengajukan proposal dengan judul "**Peningkatan Status Kota Administratif Ternate Menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate**" kepada Bupati Abdullah Assagaf. Kemudian melalui berbagai proses penelitian, baik dari Provinsi Maluku maupun Departemen Dalam Negeri, proposal dimaksud mendapatkan tanggapan positif. Dukungan DPRD Provinsi Maluku, melalui surat resmi tanggal 13 Desember 1996, dan Keputusan DPRD Tingkat II Maluku Utara Nomor 188.4/ob/DPRD/MU/1997, mendukung pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. Dua tahun kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. Tanggal 27 April 1999, diresmikan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate sekaligus melantik Drs. Syamsir Andili sebagai Walikota Ternate yang pertama di Era Otonomi Daerah.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 1999, dibentuk DPRD Kota Ternate masa bhakti 1999 – 2004. DPRD Hasil Pemilihan Umum 1999 bersama-sama dengan Pemerintah Kota Ternate membentuk dan melengkapi perangkat Pemerintah Daerah Kota Ternate. Upaya untuk melengkapi Perangkat Daerah Kota Ternate dilanjutkan oleh DPRD hasil Pemilihan Umum 2004 sampai sekarang. Selanjutnya, melalui Pemilihan DPRD Kota Ternate, maka pada tanggal 5 Mei 2000, dilantik **Drs. Syamsir Andili dan Drs. Iskandar M. Djae** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk masa bhakti 2000 - 2005. Selanjutnya melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung

tahun 2005, masyarakat Kota Ternate telah memilih **Drs. H. Syamsir Andili dan Drs. H. Amas Dinsie** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk masa bhakti 2005 - 2010. Melalui pasangan pilihan rakyat ini bersama-sama DPRD Kota Ternate masa bhakti 2004 - 2009 menjalankan bahtera Pemerintahan Kota Ternate untuk 5 tahun selanjutnya.

Kota Ternate mengalami Pemekaran Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kecamatan Pulau Batang Dua dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pada tanggal 8 November 2007, diresmikan 2 Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah, serta 11 Kelurahan Pemekaran, yaitu : Tanah Tinggi Barat, Salahuddin, Bastiong Karance, Mangga Dua Utara, Jati Perumnas, Tobona, Ngade, Sangaji Utara, Akehuda, Tubo, dan Dorpedu.

Hingga tahun 2010, satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate terdiri dari: 16 Dinas, 6 Badan, 6 Kantor, 1 Balai, 8 Bagian pada Sekretariat Daerah, dan mempunyai 6 wilayah Kecamatan serta 74 Kelurahan yang telah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

D. KOTA TERNATE DALAM KHASANAH ARSIP

Sebagaimana diuraikan dimuka bahwa arsip yang terdapat dalam program *Citra Daerah* ini adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI tentang berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat di Kota Ternate. Arsip tersebut berupa arsip tekstual, peta-peta dan foto-foto yang menggambarkan berbagai aktivitas di wilayah Pemerintah Kota Ternate sejak abad 17 sampai dengan abad 20.

Dalam Citra Daerah Ternate ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai *Geografi dan Keadaan Alam* yang diwakili berbagai arsip peta dan foto tentang keadaan alam Kota Ternate yang indah dengan Gunung Gamalama sebagai latar belakang kota.

Selain Geografi dan Pemandangan Alam, juga ditampilkan arsip yang berkaitan dengan **Kesultanan Ternate** dan **Pemerintahan** Kota Ternate mulai sejak jaman Kolonial sampai dengan terbentuknya Kota Ternate sebagai pemekaran dari Kota Administratif Ternate pada 1999. Arsip lain yang juga menarik ditampilkan pada naskah Citra Ternate dalam Arsip ini adalah yang berkaitan dengan **Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan, Pendidikan, Perkebunan, Bangunan dan Perhubungan**. Seluruh arsip yang ditampilkan pada naskah ini dapat diakses oleh masyarakat luas secara detail di Arsip Nasional Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, Paramita, R. Z. Leirisa dkk, *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku, 1973.

Amal, M. Adnan. *Maluku Utara : Perjalanan Sejarah 1250-1800*. Ternate: Universitas Khairun, 2002.

D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional.

Kattopo, E, *Nuku*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987

Marwati D. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Monograf Kota Ternate 2004

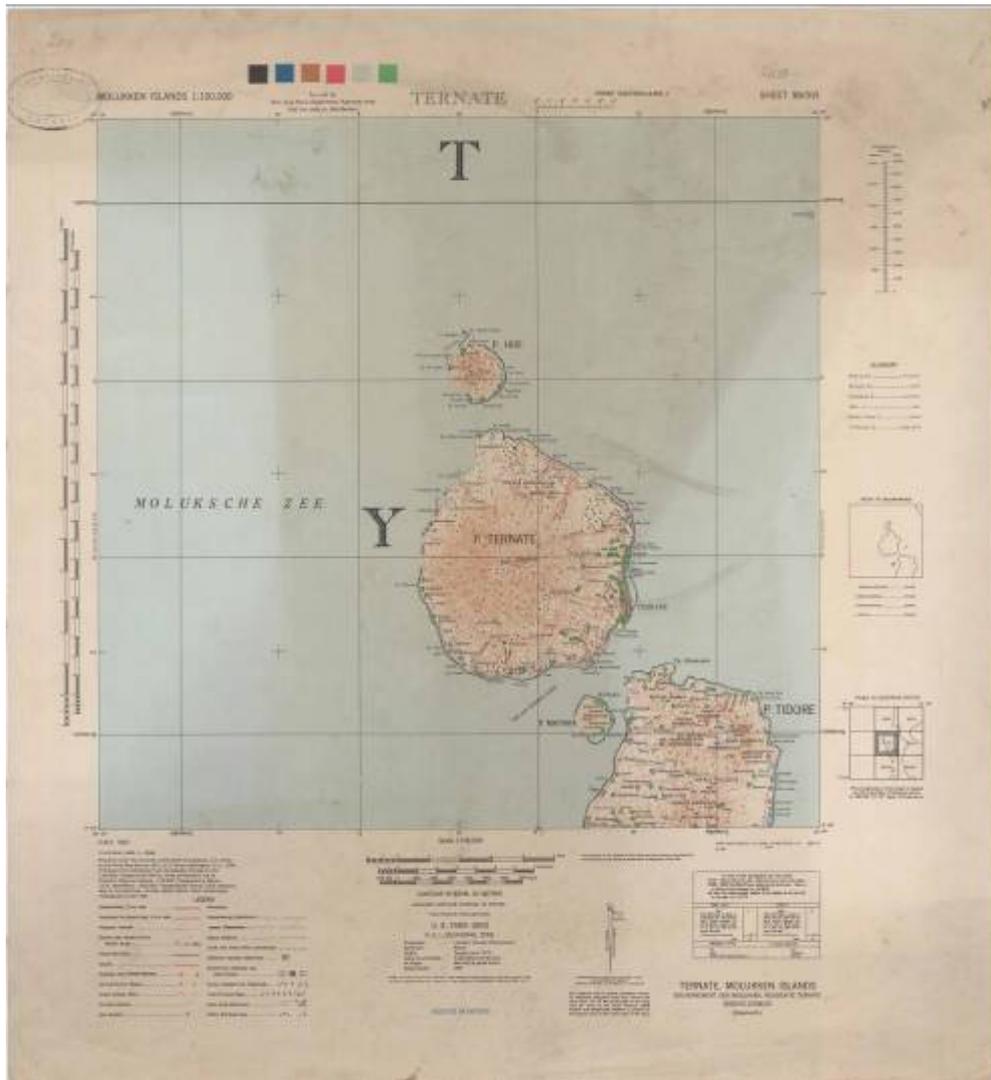
Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. *Profil Provinsi Republik Indonesia : Maluku*, 1992.

www.kota-ternate.go.id

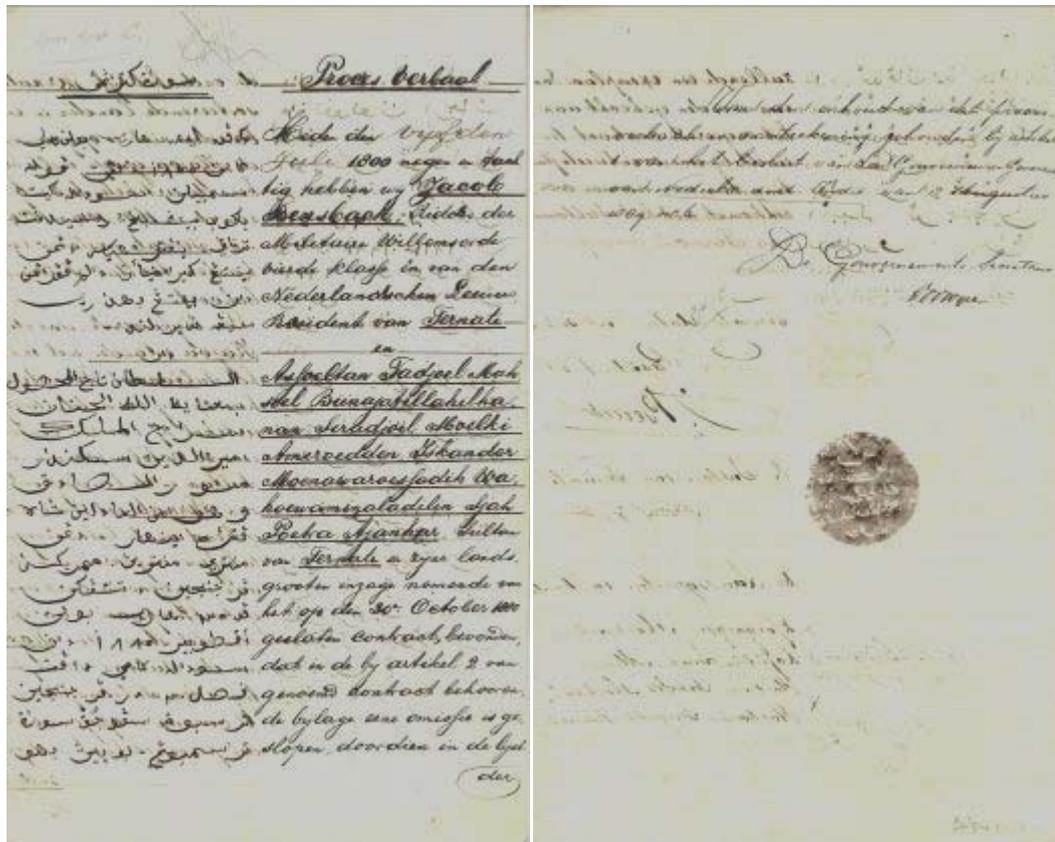
www.wikipedia.org

CITRA TERNATE DALAM ARSIP

Geografi

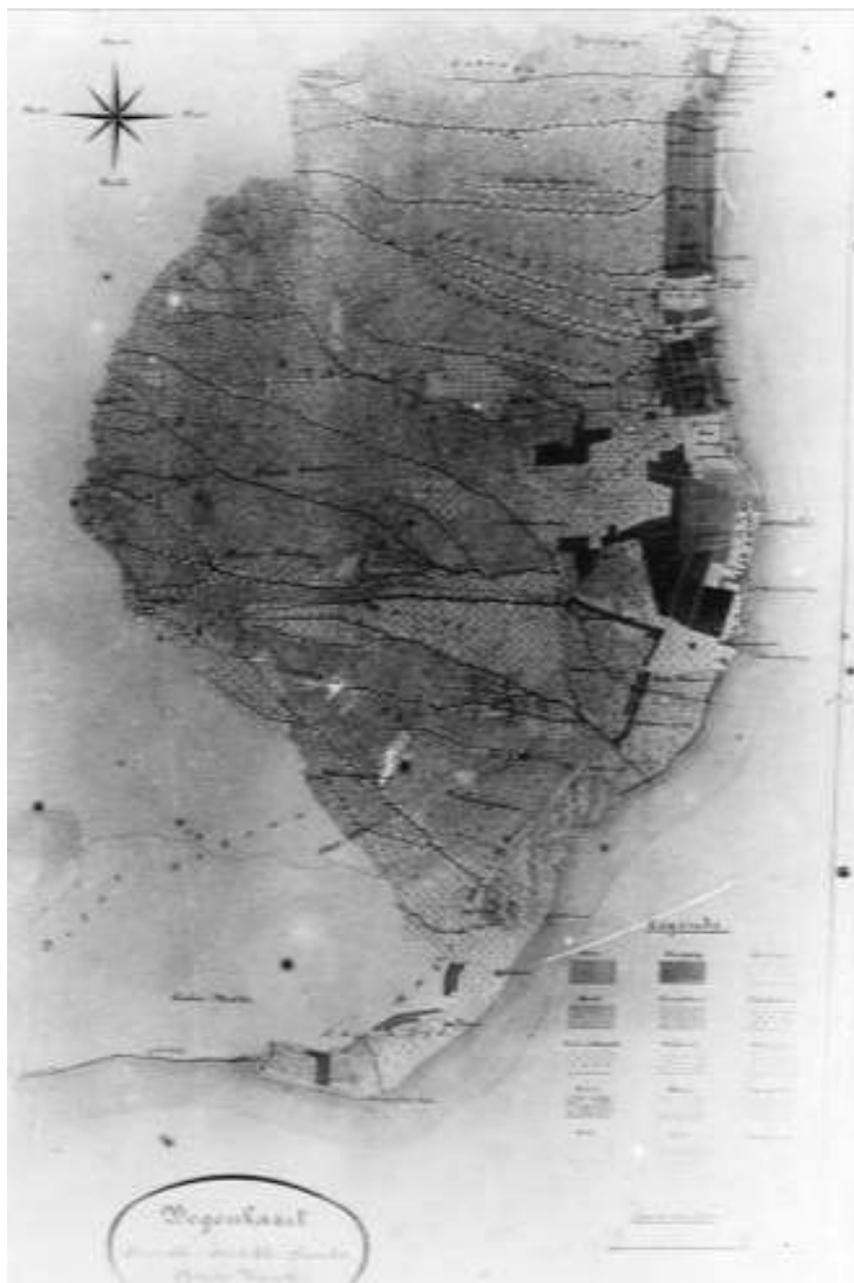


Peta Pulau Hiri, Pulau Ternate,
Pulau Maitara dan Pulau Tidore, 1944
Sumber: ANRI, Dinas Topografi No. 2859



Proses Verbal mengenai pernyataan bahwa Kepulauan Kajoa berada di bawah Pemerintahan Ternate, 5 Juli 1889

Sumber: ANRI, Kontrak Ternate 362



Peta situasi jalan di wilayah Ternate,
tahun 1931

Sumber: ANRI, KIT 988/77



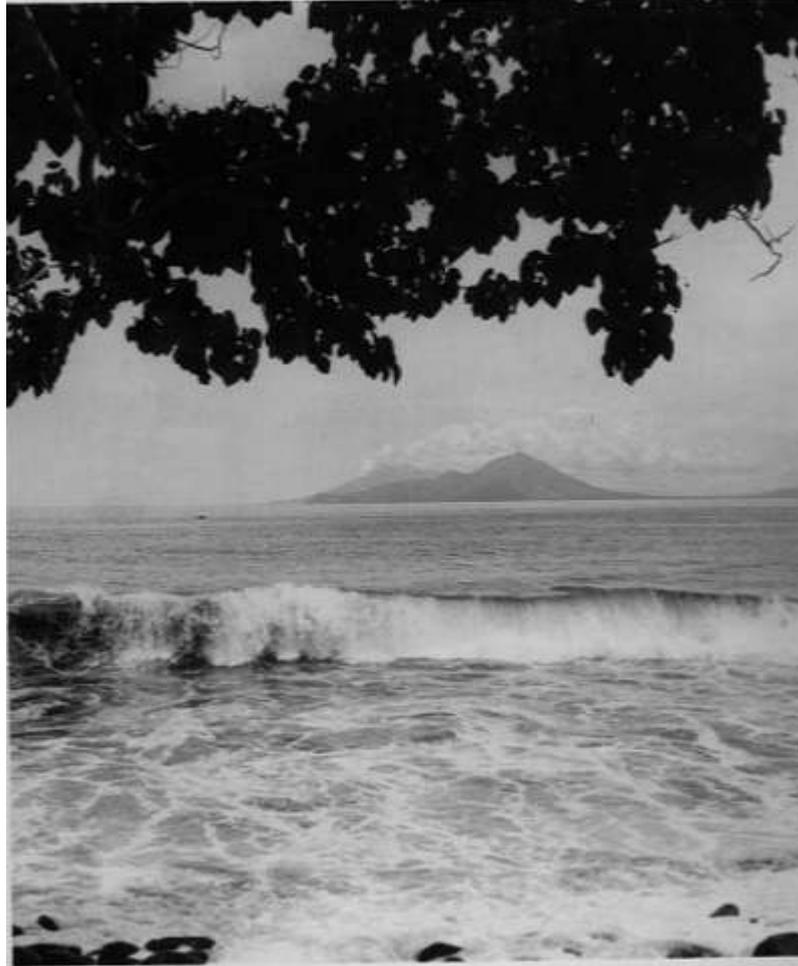
Pemandangan dermaga Ternate dengan latar belakang
Gunung Api Gamalama,
tahun 1931

Sumber: ANRI, KIT 528/12 dan KIT 148/59



Pemandangan Pulau Maitara dilihat dari Ternate,
17 November 1951 dan 3 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 90519 vv 2, 540603 vv 2
dan 511117 vv53



Pemandangan di tepi pantai Ternate,
17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 60



Pemandangan pantai Ternate dengan latar belakang
deretan pohon kelapa,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 55



Hamparan teratai di tepi Telaga Laguna dengan latar belakang
puncak Gunung Api Gamalama,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 51



Senja di tepi Pantai Ternate,
25 Mei 1952

Sumber: ANRI, Kempen 520525 ww 113

Resultanan Ternate



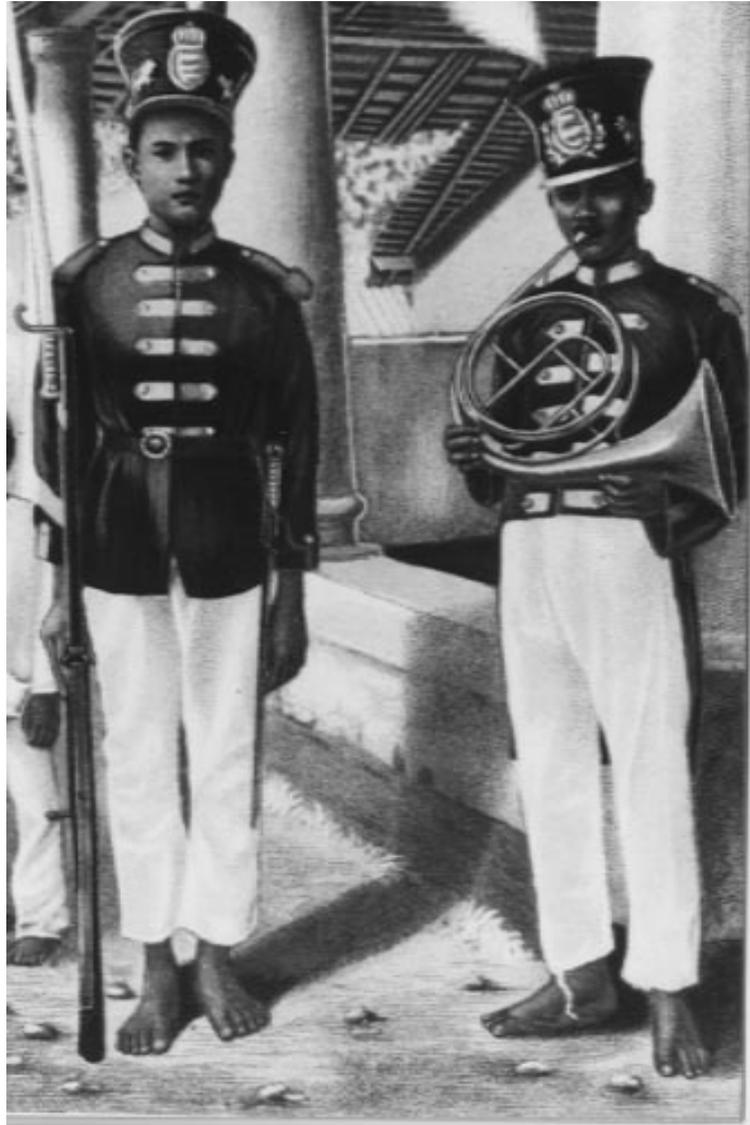
Dua orang pasukan pengawal Kesultanan Ternate
sedang berjaga dengan senjata di tangan,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 453/86



Staf dan Korps Musik dari Kesultanan Ternate,
tahun 1893

Sumber: ANRI, KIT 217/50



Profil prajurit Kesultanan Ternate,
tahun 1893

Sumber: ANRI, KIT 1095/85



Sultan Ternate,
Sultan Haji Muhammad Usman (1896-1904),
1901

Sumber: ANRI, KIT 270 / 54



Pintu gerbang Istana Kesultanan Ternate,
tahun 1931

Sumber: ANRI, KIT 779/78 dan Kempen 90519 vv 11



Mr. Alex Cann juru kamera NIGIS (*Netherland Indies Government Information Service*) merekam kedatangan Sultan Ternate, Iskandar Mohammed Djabir Sjah XLVI. Tampak Putra Sultan Ternate turun dari pesawat diiringi Mayor de Mul, Dr.Ch.O. van Der Plas dan Mr. L. Mees, Juni 1945

Sumber: ANRI, NIGIS No. AV.90 0928-MS



Pertemuan Dr. H. J. Van Mook (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) dan Sultan Ternate Iskandar Mohamed Djabir Sjah di Kamp Columbia, Australia, Juni 1945

Sumber: ANRI, NIGIS No. A 12792



Jamuan makan siang di mess Kamp Columbia, Australia.
Dari kiri ke kanan: Sultan Ternate, Iskandar Mohammed Djabir
Sjah XLVI, Dr. H. J. Van Mook, Ds. NS. Bloom dan Dr. RE Smits,
Juni 1945

Sumber: ANRI, NIGIS No. A 12814



Istana Kesultanan Ternate,
tahun 1931 dan 1 Juni 1954

Sumber: ANRI, KIT 90519 vv 10 dan Kempen 540601 vv 1-1



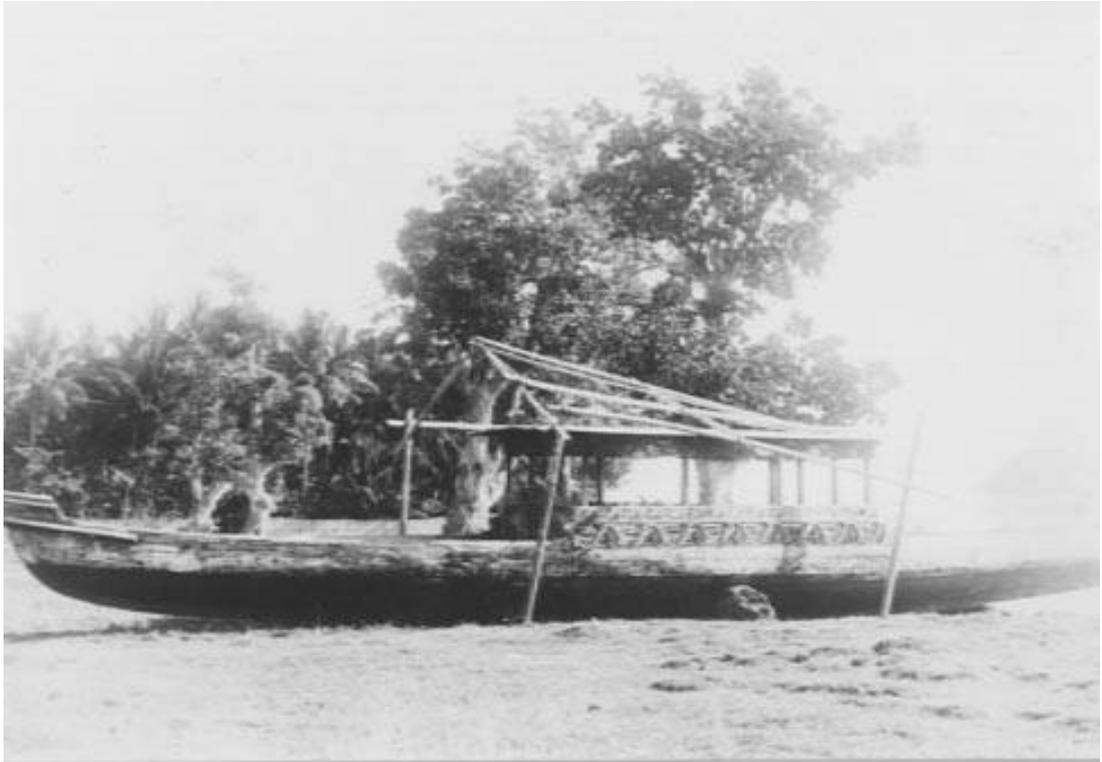
Istana Kesultanan Ternate dengan latar belakang
Gunung Api Gamalama,
Tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 249/62 dan 148/63



Kompleks pemakaman Sultan Ternate,
Tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 816/9



Perahu Sultan Ternate dalam keadaan rusak,
1931

Sumber: ANRI, KIT 542/54



Pemandangan di halaman Kesultanan Ternate
pada saat kunjungan Presiden Soekarno,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 12



Presiden Soekarno berdoa bersama keluarga Sultan Ternate,
pada kunjungan beliau ke Maluku,
17 November 1951

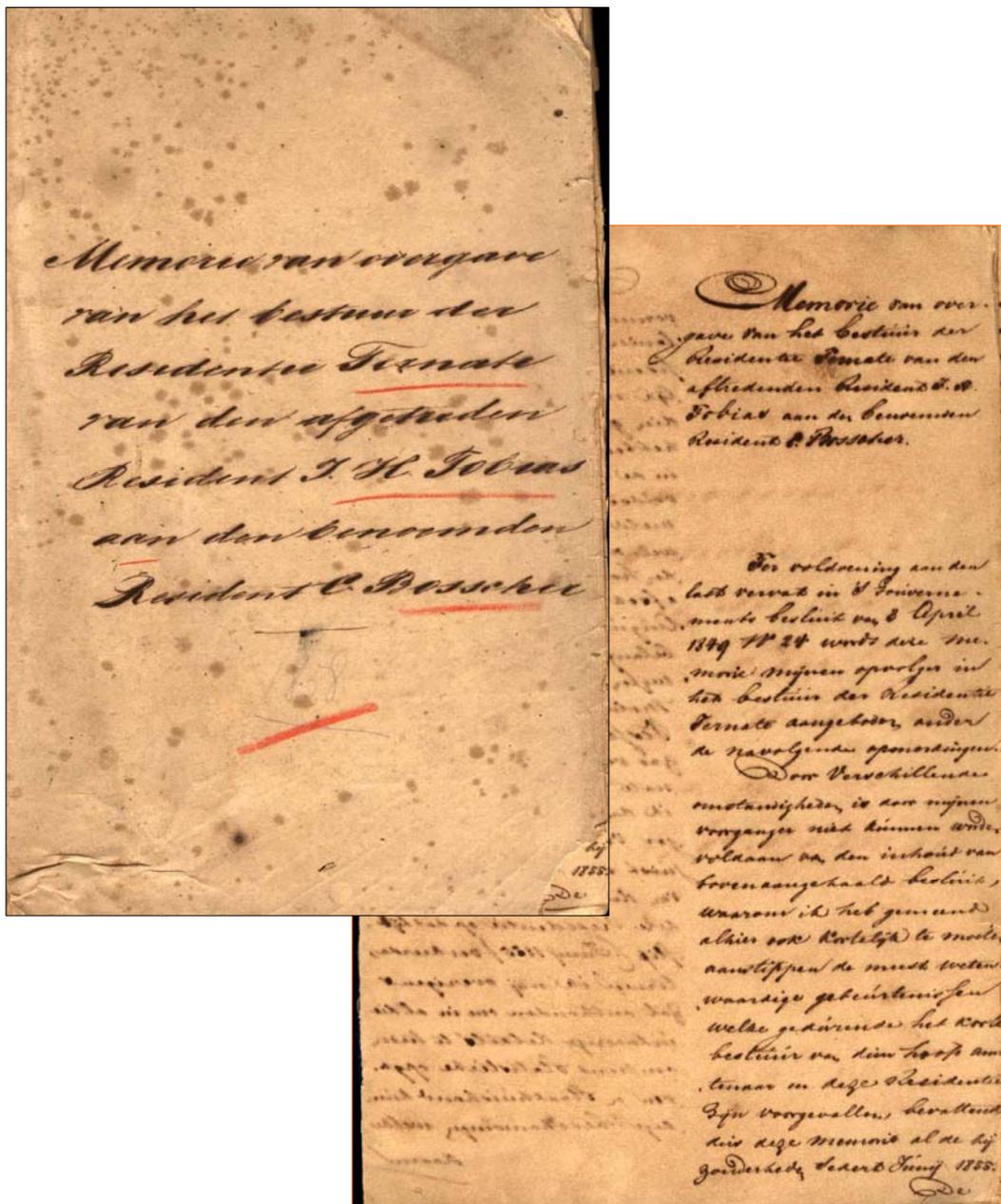
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 18



Presiden Soekarno ditengah-tengah keluarga Sultan Ternate,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 21

Pemerintahan



Fragmen Serah Terima Jabatan pengunduran diri Residen Ternate; J.H. Tobias dan pengangkatan C. Bosscher sebagai residen baru, 1853

Sumber: ANRI, Ambon No. 1513

Kort verslag der meldens
waardige gebeurtenissen in de
Residentie Ternate, gedurende
de maand July 1858.

Inlandsche vorsten en grooten De Sultan van Tidore -
Baban en de stede van genoemd
te geschiedheid
H. H. de Sultan van Ternate
nadeel al meer en meer den staat
van koudheid, zodat het mogelijk
is niet mogelijk is, eenige van
gelegenheden met hem te behandelen.
Overigens brennd hij zich over een
veel zijner leghandelingen te stand
betreft, gedurende deze maand,
vrij wdt.

Militairen onder de stultmanen. Op den 25^{en} werd alhier ontvangen
a. het gouvernementale besluit van den
16^{en} Juni 1858, waarbij werd
ingetrokken de bepaling, bij
besluit van 17 Februarij 1855, N. 10,
van F. J. van Dill de 1^{en} Divisie,
tot kommissie op het Residentie
kantoor terzins gesprek bij den

1858

Fragmen Laporan Singkat Residen Ternate kepada Gubernur
Kepulauan Maluku di Ambon tentang kejadian-kejadian
di Karesidenan Ternate selama bulan Juli 1858

Sumber: ANRI, Ambon No. 1509

*Algemeen verslag
der
Nederlandsche Regeering
over het jaar 1867.*

Geneeswijze *Indiëside het jaar 1867*
hebben gezigt veranderingen
in het gezondheidsstandpunt

Bevolking *Op den laatste Decem-
ber 1867 bedroeg de bevolking*
volgens opgaven

I. Gouvernements onderdanen

<i>Nederlandsche in Indië land of zee buiten Nederland</i>	<i>45</i>
<i>Indie geboren</i>	<i>113</i>
<i>Nederlandsche in Nederlandsch-Indie geboren</i>	<i>6</i>
<i>Europeaan in Nederlandsch-Indie geboren</i>	<i>1</i>
<i>Europeaan buiten Nederland in Indië geboren</i>	<i>673</i>
<i>Chinezen</i>	<i>226</i>
<i>Arabieren</i>	<i>59</i>
<i>Andere oorsprong (Siam, etc.)</i>	<i>1325</i>

II. Niet bij ons staats

<i>Ternate</i>	<i>7090</i>
<i>Kalabakera</i>	<i>1100</i>
<i>Makura</i>	<i>1415</i>
<i>Harau</i>	<i>100</i>
<i>Soela-landten</i>	<i>2910</i>
<i>Banjarwaasche bezittingen</i>	<i>1100</i>
<i>Lombokoe</i>	<i>7975</i>

III. Het Rijk van Tidore

<i>Tidore</i>	<i>10115</i>
<i>Kalmahura</i>	<i>6369</i>
<i>Soera</i>	<i>221</i>
<i>Saba</i>	<i>1034</i>
<i>Waijale</i>	<i>2218</i>
<i>Sulawase</i>	<i>2291</i>
<i>Kustle</i>	<i>1954</i>
<i>Siwa-Siwa</i>	<i>1563</i>

IV. Het Rijk van Soela

<i>Gouvernements onderdanen</i>	<i>209</i>
<i>Tamoraen</i>	<i>126</i>
<i>Sultans onderdanen</i>	<i>1004</i>

Van deze eijfers verdienen
alleen die verhanven die door
een nauwkeurig toezicht door
*de afdelingshoofd van de be-
voornemen onderdanen ver-
kregen zijn*
De eijfers verkregen van de
voortien zijn vermoedelyk van
*der eenige van 1867 te jama-
quide.*
Van de afgelegen eilanden
kan ook moogelyk anders dan
by gisting gehandeld worden.
Dij den leijgerlyken
stand zijn gedurende 1867

Fragmen Laporan Umum Karesidenan Ternate tentang wilayah, kependudukan, kepolisian, pengairan, situasi, dinas pekerjaan umum, perikanan, perdagangan pelabuhan, perputaran uang, dan keagamaan,

1867

Sumber: ANRI, Ternate 162



Residen Ternate dan para pembesar setempat
berfoto di depan rumah Residen Ternate,
31 Agustus 1893

Sumber: ANRI, KIT 217/48



Residen Ternate dan para pembesar setempat
berfoto di depan rumah Residen Ternate,
31 Agustus 1893

Sumber: ANRI, KIT 217/48

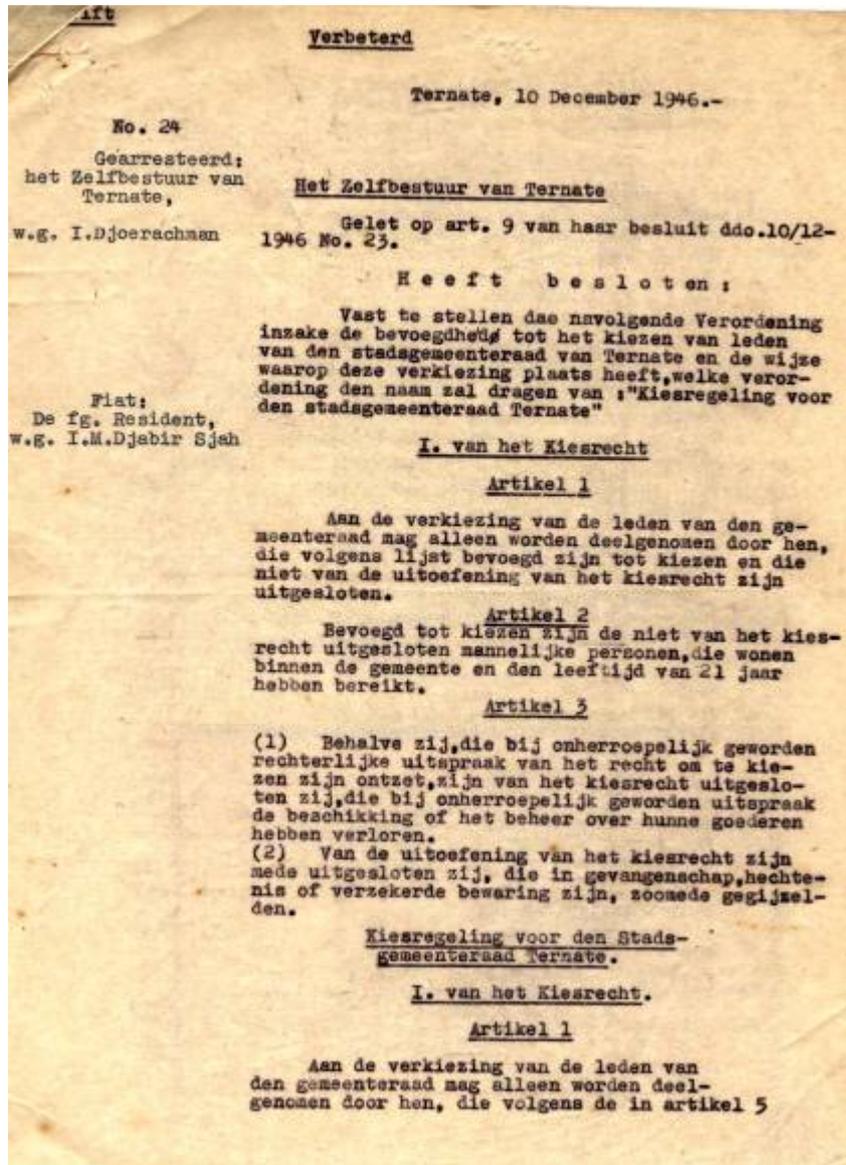


Fragmen Akte Perjanjian Raja Muda Mohamad Djabir sebagai Sultan Ternate, antara lain akan menjalankan pemerintahan dan kesejahteraan negeri,
2 September 1929
Sumber: ANRI, Ternate 237



Residen Ternate, Raja Tafalgur sedang melakukan perjalanan dinas dengan perahu tradisional, tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 451/66



Fragmen Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tanggal 10 Desember 1946 tentang Peraturan Pemilihan Dewan Kota Praja Ternate
Sumber: ANRI, Algemeene Secretarie No. 1336



Wakil Presiden Mohammad Hatta di tengah-tengah keluarga
Kepala Daerah Ternate dalam rangka kunjungan kerja
ke Ternate,
16 Maret 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511797



Suasana rapat raksasa di lapangan depan
Istana Kesultanan Ternate,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 33 dan 59



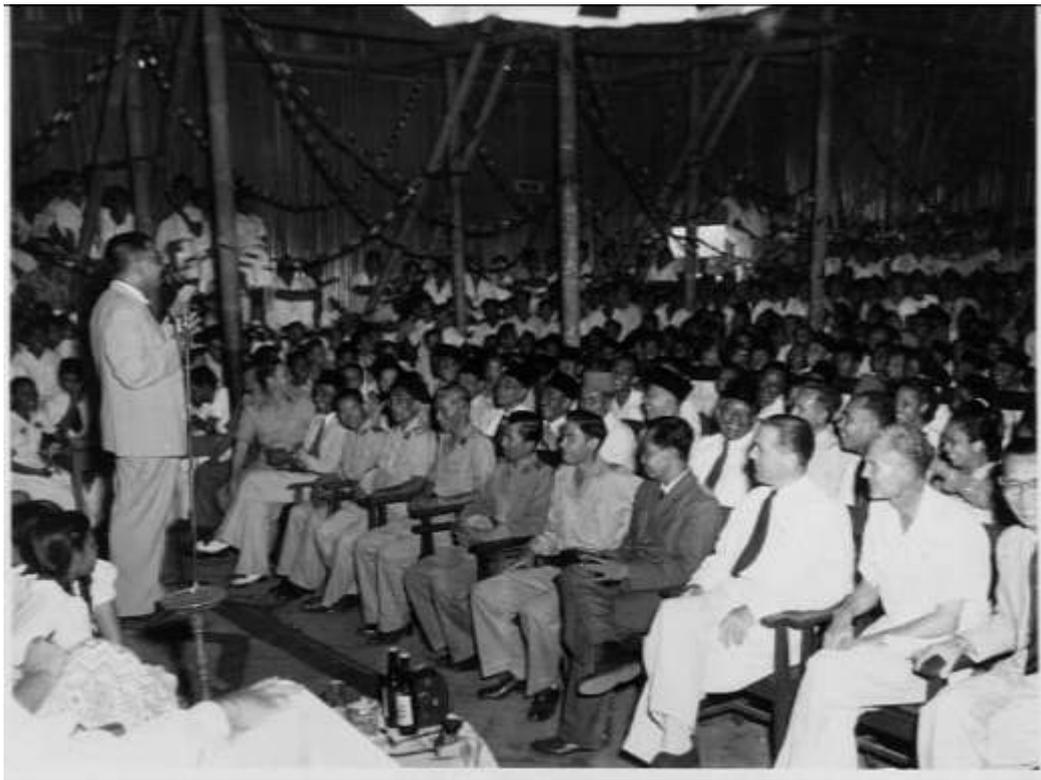
Rombongan Presiden Soekarno tiba di Pelabuhan Ternate
menuju ke Istana Kesultanan Ternate,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 24



Wartawan dari perwakilan negara sahabat sedang beramah tamah dengan Presiden Soekarno di Istana Sultan Ternate, 17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 16



Suasana rapat umum di Ternate yang dihadiri oleh para pejabat daerah dan para wartawan dari dalam dan luar negeri,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 6



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati beserta rombongan
tiba di Pelabuhan Ternate,
17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 20



Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disambut
oleh rakyat Ternate ketika tiba di Pelabuhan
Ternate, 17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 12



Sesaat setelah tiba di Pelabuhan Ternate,
Presiden Soekarno disambut oleh masyarakat Ternate,
17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 13



Menteri Penerangan Dr. F.L. Tobing memberikan semangat kepada rakyat Ternate dalam Rapat Umum di depan Istana Kesultanan Ternate, 17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 9



Bung Tomo dari Biro Irian Barat berpidato
dalam rapat umum di Ternate,
17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 11



Sambutan rakyat di Dermaga Ternate saat
Presiden Soekarno berkunjung,
18 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540718 vv 91



Rombongan 4 menteri (Wakil Perdana Menteri I; Moh. Roem, Menteri Penerangan; Sudibjo, Menteri Dalam Negeri; Sunarjo dan Menteri Urusan Umum; H. Rusli Abdul Wahid) tiba di Pelabuhan Ternate dalam rangka kunjungan kerja ke Ternate, 1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 38



Menteri Penerangan Sudibjo sedang berjabat tangan dengan
para pejabat Pamong Praja di Ternate,
1 Juni 1956

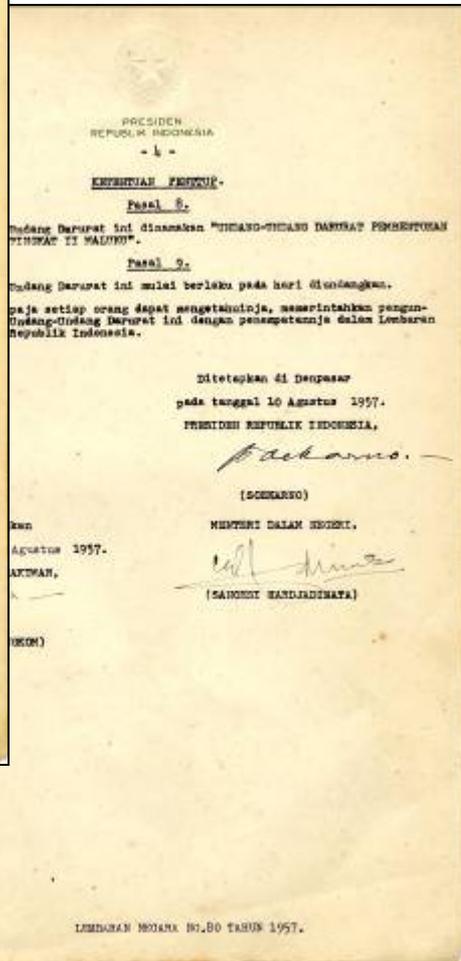
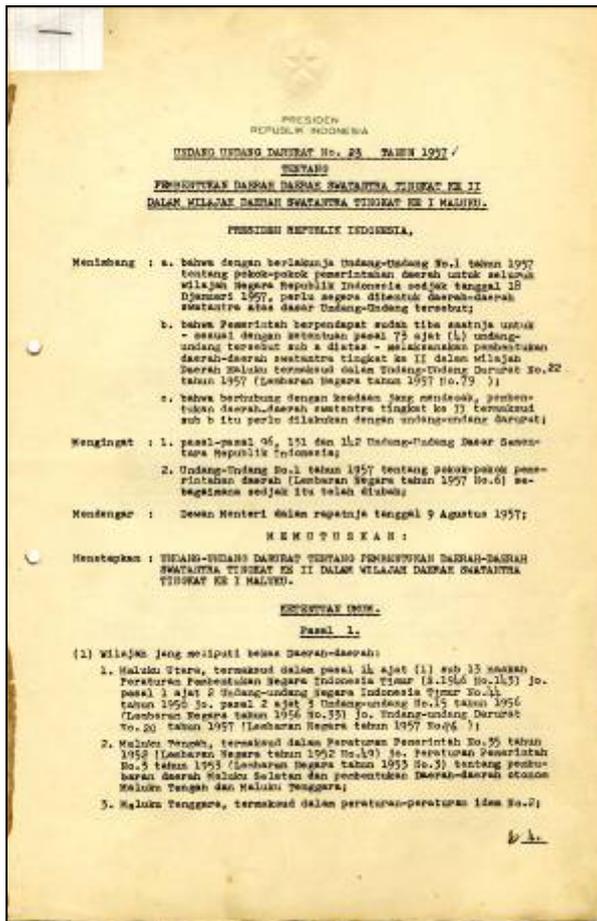
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 1-11



Ny. Mohammad Roem berjabat tangan dengan
Istri Kepala Daerah Ternate

1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 30



Fragmen Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Swatantra Tingkat I Maluku,
10 Agustus 1958
Sumber: ANRI, Setkab/Undang-Undang Darurat Nomor 23/1957

UNDANG-UNDANG No. 60 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 23 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM WILAJAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 80), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 No. 80);
 b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 23 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM WILAJAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 80), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 No. 80), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

K E Y E S T U A N T E M U .

Pasal 1.

(1) Wilayah yang meliputi bekas Daerah-daerah:

1. Maluku Utara, termaktub dalam pasal 14 ayat 1 sub 13 nasakh Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 145) jo. pasal 1 ayat 2 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 jo. pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 76);
2. Maluku Tengah, termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 49) jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 2) tentang pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah-daerah Swatantra Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;

- 4 -

...er siapa saja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan penerapan Undang-undang ini dengan memperhatikan dalam Lembaran Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
 pada tanggal 17 Djuli 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
SUKARNO,
 MENTERI DALAM NEGERI,

[Signature]
SAHIBU BAKINDADJANTA

Hendengkan
 tanggal 31 Djuli 1958.
 MENTERI KEMENTERIAN,
[Signature]
G. A. MAREKREK,

Fragmen Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku, 17 Juli 1958
 Sumber: ANRI, Setkab/Undang-Undang Nomor 60/1958



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

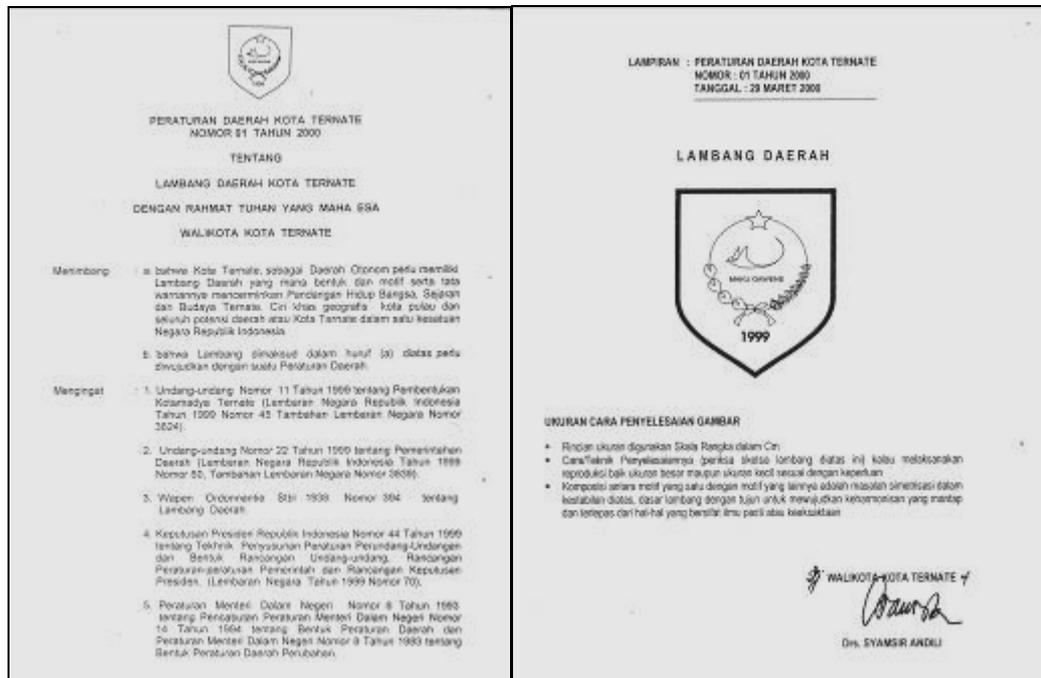
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara pada umumnya serta Kota Administratif Ternate pada khususnya, dan adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - bahwa Kota Administratif Ternate dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
 - bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;

Fragmen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate,
20 April 1999

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Lambang Daerah Kota Ternate,
29 Maret 2000

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



GUBERNUR MALUKU UTARA
TERNATE

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA ;

PADA HARI INI : KAMIS
TANGGAL : 4 MEI 2000

KAMI GUBERNUR MALUKU UTARA ATAS NAMA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN RESMI MELANTIK :

SAUDARA DRS. SYAMSIR ANDILI
SEBAGAI WALIKOTA TERNATE

DAN

SAUDARA DRS. ISKANDAR MUHAMMAD DJAE
SEBAGAI WAKIL WALIKOTA TERNATE

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.71-205 DAN NOMOR 132.71-206 TANGGAL 28 APRIL 2000

KAMI PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

PJ. GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL MUHYI EFFENDIE

Naskah Pelantikan Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili,
sebagai Walikota Ternate periode 2000-2005,
4 Mei 2000

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-641 Tahun 2005
tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan
Pengangkatan Walikota Ternate Provinsi Maluku Utara,
1 Agustus 2005.

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



GUBERNUR MALUKU UTARA

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KE HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA ;

PADA HARI INI : RABU
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2005

SAYA GUBERNUR MALUKU UTARA ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RESMI MELANTIK ;

**SAUDARA Drs. H. SYAMSIR ANDILI
SEBAGAI WALIKOTA TERNATE
MASA JABATAN TAHUN 2005 - 2010**

DAN

**SAUDARA Drs. H. AMAS DINSIE
SEBAGAI WAKIL WALIKOTA TERNATE
MASA JABATAN TAHUN 2005 - 2010**

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.72 - 641 DAN NOMOR 132.72 - 642, TANGGAL 1 AGUSTUS 2005.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA-SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR MALUKU UTARA

Drs. H. THAIB ARMALIN

Naskah Pelantikan Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili sebagai
Walikota Ternate periode 2005-2010,
10 Agustus 2005

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili memberikan cenderamata kepada Duta Besar Portugal untuk Indonesia, Jose Manuel Santos Braga di Ternate, 29 Maret 2006

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



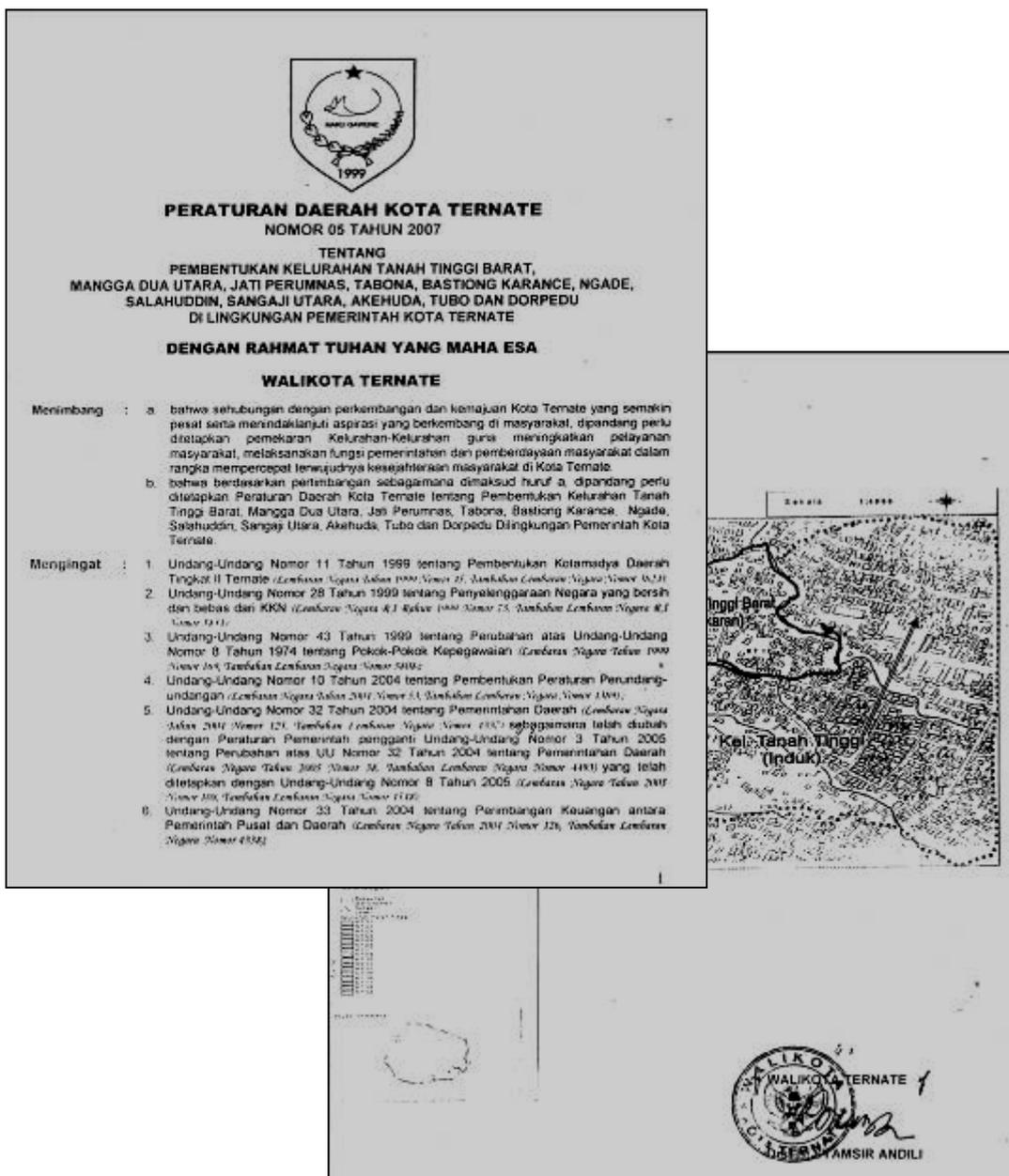
Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili menerima ucapan selamat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Penyerahan Piala Adipura di Bali, 6 Juni 2007

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



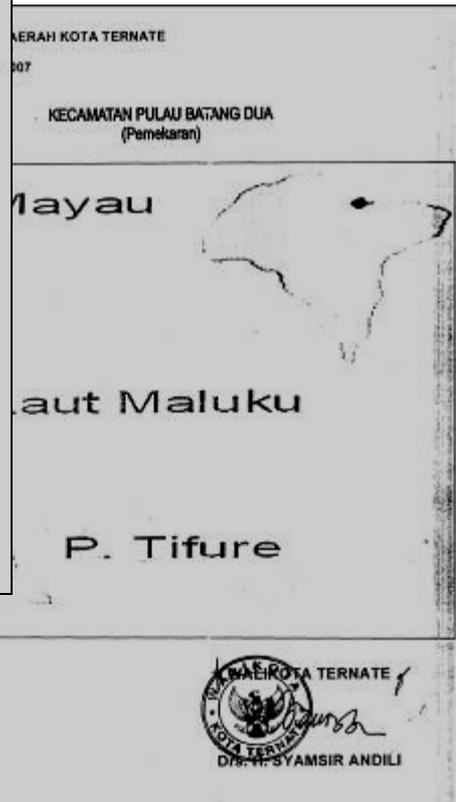
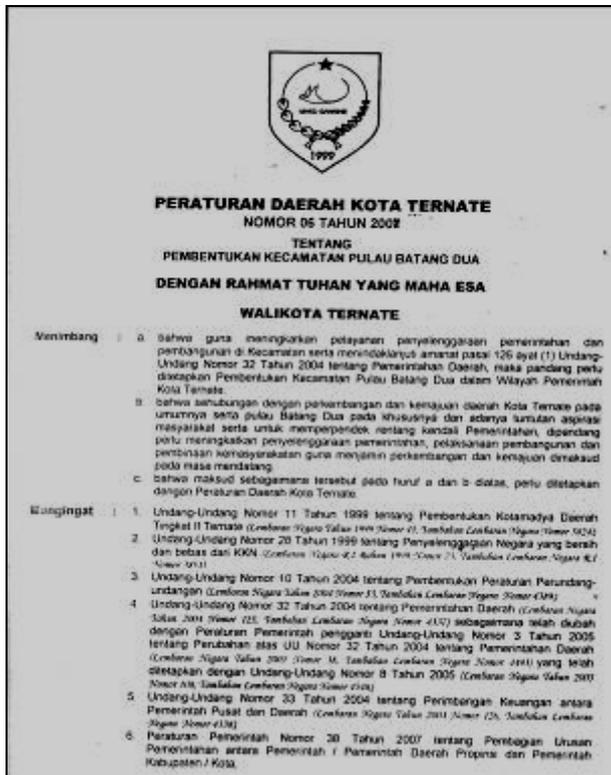
Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili menerima ucapan selamat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Koperasi Sedunia ke-60 di Bali,
12 Juli 2007

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



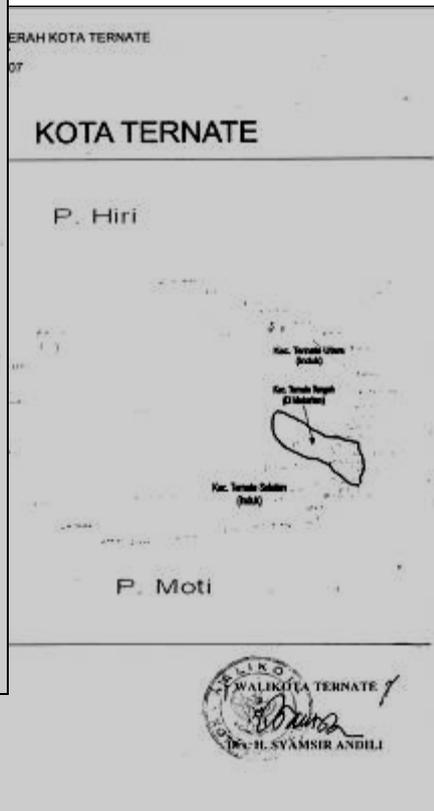
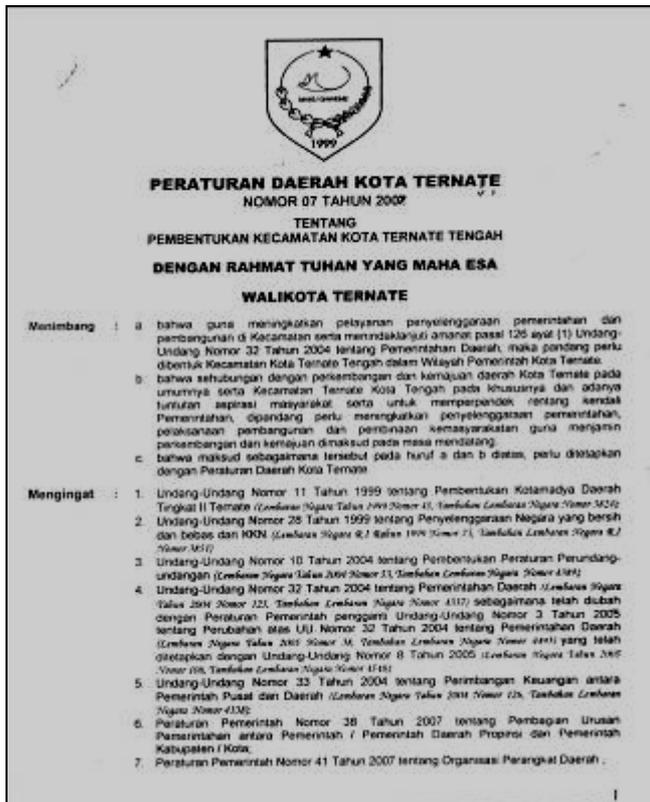
Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Mangga Dua Utara, Jati Perumnas, Tabona, Bastiong Karance, Ngade, Salahudin, Sangaji Utara, Akehuda, Tubo dan Dorpedo di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate,
9 Agustus 2007

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



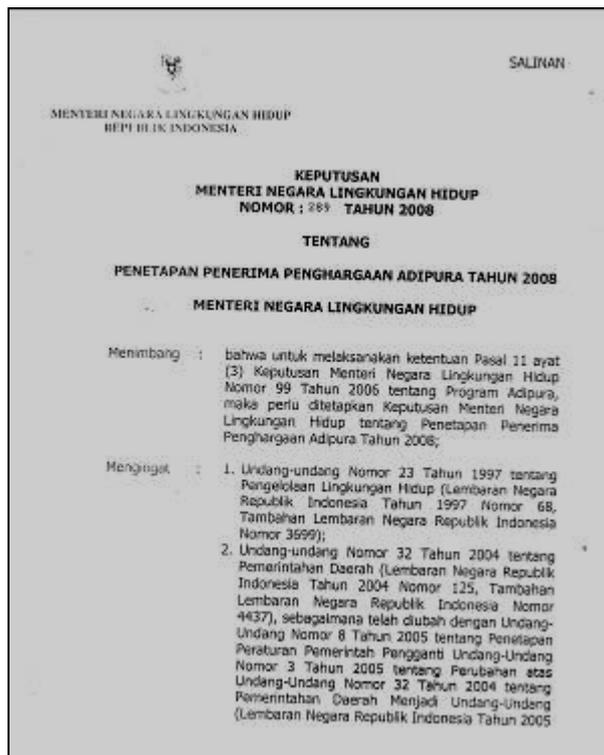
Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate No. 6 Tahun 2007
 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Batang Dua,
 9 Agustus 2007

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate No. 7 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kecamatan Kota Ternate Tengah,
9 Agustus 2007

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



DAerah	KAB/KOTA	KATEGORI
Garut	KAB. GARUT	KECIL
Mataram	KOTA MATARAM	SEDANG
Sawahlunto	KOTA SAWAHLUNTO	KECIL
Bangka	KAB. BANGKA	KECIL
Bangkalan	KAB. BANGKALAN	KECIL
Palembang	KOTA PALEMBANG	METROPOLITAN
Kerinci	KAB. KERINCI	KECIL
Trenggalek	KAB. TRENGGALEK	KECIL
Pondoro	KAB. PONDORO	KECIL
Ternate	KOTA TERNATE	SEDANG
Probolinggo	KAB. PROBOLINGGO	KECIL
Kuningan	KAB. KUNINGAN	KECIL
Karanganyar	KAB. KARANGANYAR	KECIL
Tidore Kepulauan	KOTA TIDORE KEPULAUAN	KECIL
Belu	KAB. BELU	KECIL
Fak-fak	KAB. FAK-FAK	KECIL
Jakarta Selatan	KOTA JAKARTA SELATAN	METROPOLITAN
Sidoarjo	KAB. SIDOARJO	SEDANG
Pare-pare	KOTA PARE-PARE	SEDANG
Bondowoso	KAB. BONDOWOSO	KECIL
Bontang	KOTA BONTANG	SEDANG
Batam	KOTA BATAM	BESAR
Bone	KAB. BONE	SEDANG
Jakarta Barat	KOTA JAKARTA BARAT	METROPOLITAN
Surabaya	KOTA SURABAYA	METROPOLITAN
Kepahiang	KAB. KEPAHIANG	KECIL
Singkawang	KOTA SINGKAWANG	SEDANG

Fragmen Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
 Nomor 289 Tahun 2008 tentang Penetapan Penerima
 Penghargaan Adipura Tahun 2008,
 4 Juni 2008

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Piala Adipura kepada Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili di Istana Negara, Jakarta
5 Juni 2008

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate



Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili dengan Piala Adipura
di depan Istana Negara, Jakarta
5 Juni 2008

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Ternate

Pertahanan dan Keamanan



Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan para pejabat
dari Angkatan Bersenjata dan Pengawal Kepresidenan
ketika berkunjung ke Ternate,
16 Maret 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511792



Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan
dalam kunjungannya di Ternate,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 45



Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan
dalam kunjungannya ke Benteng Kesatuan
17 Agustus 1945 di Ternate,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 44



Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga pada salah satu makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Ternate, 17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 47



Wakil Perdana Menteri I Mr. Moh. Roem disambut oleh para perwira Angkatan Darat sesaat tiba di Pelabuhan Ternate, 1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 1- 12



Ny. Herawati Diah dan Nn. Kartini Sastranegara
bersama anak buah kapal Dradjat
di rumah Kepala Daerah Ternate,
17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 6



Presiden Soekarno tengah melihat-lihat mesin Kapal Drajat
yang sedang berlayar di perairan Pantai Ternate,
18 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540718 vv 113

Keagamaan



Masjid Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 148/65 dan 803/79



Masjid Tua di Pulau Makian wilayah Ternate,
Tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 803/83



Gereja Protestan Kota Ternate
1 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540601 V V 2-2



Kapal pengangkut rombongan jemaah haji yang akan bertolak
dari Pelabuhan Ternate,
2 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 1



Presiden Soekarno dengan para pemuka agama di Istana
Kesultanan Ternate,
17 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 547017 vv 1 dan vv 4



Presiden Soekarno disambut oleh para alim ulama
ketika berkunjung ke masjid Ternate,
29 Agustus 1957

Sumber: ANRI, Kempen 570829 vv 16

Kebudayaan



Para penari istana dengan busana kebesaran
khas Kesultanan Ternate,
[1930]

Sumber: ANRI, KIT 1095 / 79



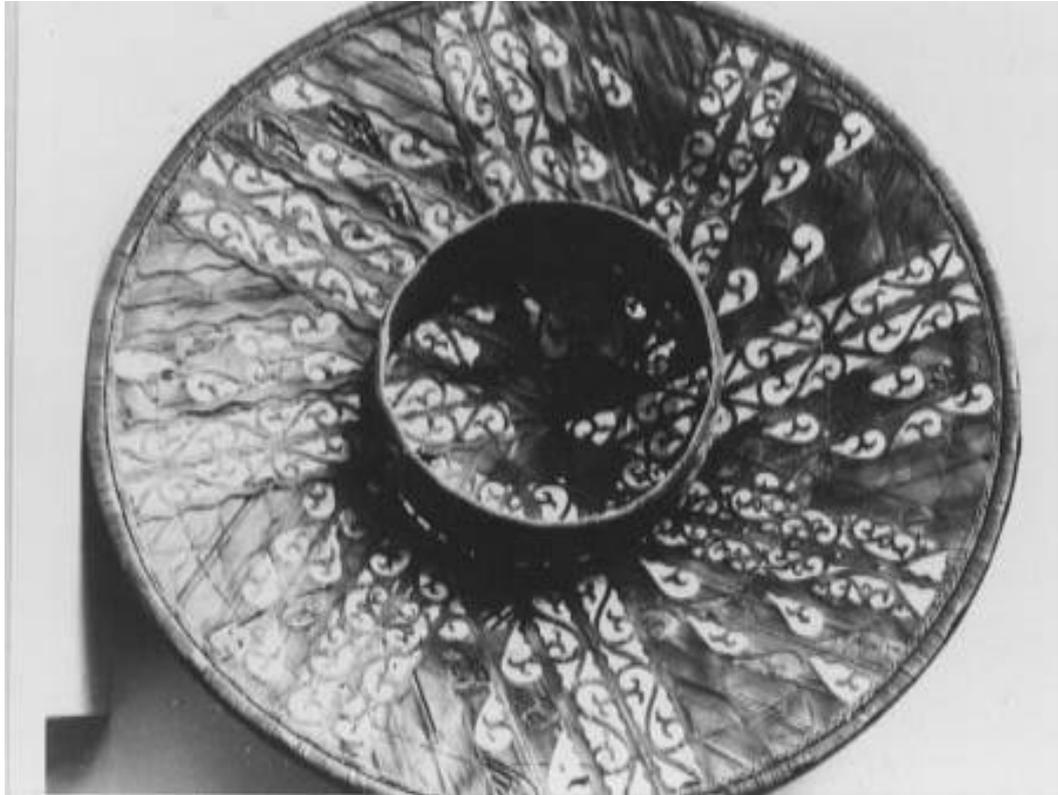
Penari istana Kesultanan Ternate tengah mempersiapkan diri
menyambut kedatangan Sultan Ternate,
[1930]

Sumber: ANRI, KIT 92/16



Korps musik yang mengiringi para penari istana
Kesultanan Ternate,
[1930]

Sumber: ANRI, KIT 92/80



Topi khas Ternate dengan bahan daun dan bermotif tradisional
dengan ukiran tangan,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 868/61



Profil Laki-laki penduduk asli Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 451/6



Kotak ukiran dari kayu cendana sebagai cendera mata
dari masyarakat Ternate kepada
Gubernur Maluku Mr. Latuharhary,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 4



Profil putri Ternate,
17 November 1951
Sumber: ANRI, 511117 vv 15



Gadis-gadis Ternate sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan rombongan menteri yang bekunjung ke Ternate, 1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 1-1



Tarian Dana-dana yang diikuti oleh para tamu dalam acara
ramah tamah menyambut kedatangan tamu kenegaraan
di Ternate,
1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 35



Tari Gale-gale, tarian tradisional masyarakat Ternate,
29 Agustus 1957

Sumber: ANRI, Kempen 570829 vv 1-3



Tari Soya-soya,
tarian tradisional masyarakat Ternate,
30 Agustus 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570830 vv 2-10

Pendidikan



Pawai Sekolah Kepandaian Putri di Ternate,
17 Juli 1957

Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 17



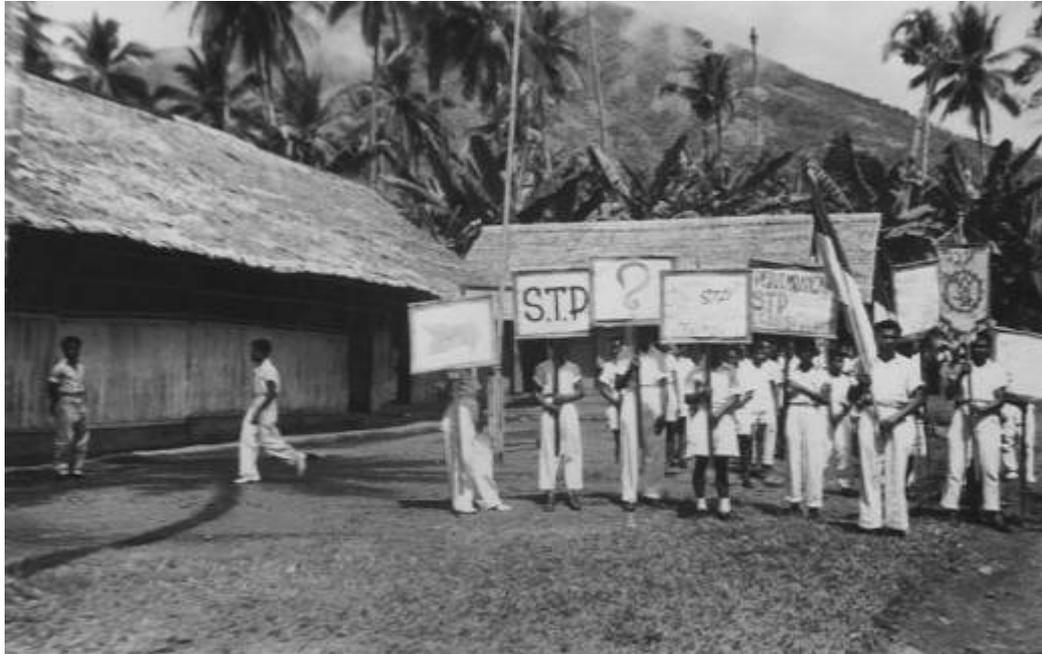
Pelajar putri Ternate menyematkan bunga kepada Presiden Soekarno ketika tiba di pelabuhan Ternate, 18 Juli 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540718 vv 124



Sematan bunga di dada Wakil Presiden Mohammad Hatta
oleh pelajar putri ketika tiba di Ternate,
14 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541014 vv 3-16



Pelajar Sekolah Teknik Putra menyambut kedatangan Wakil
Presiden Mohammad Hatta di Ternate,
15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 1-3



Barisan pelajar Ternate membentuk pagar betis
untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta
di Ternate,
15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 1-8



Pawai pelajar SD Kenari Tinggi menyambut kedatangan
Wakil Presiden Mohammad Hatta,
15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 1- 11



Wakil Presiden Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat IV Latihan S.G.B. Jalan Busdiri di Ternate, 15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 5



Barisan pelajar SMEP Negeri Ternate melepas Wakil Presiden
Mohammad Hatta meninggalkan Ternate,
15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 12



Seorang pelajar putri menyerahkan karangan bunga
kepada Ny. Moh. Roem ketika tiba
di Pelabuhan Ternate,
1 Juni 1956

Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 40



Presiden Soekarno berjabat tangan dengan seorang pelajar
ketika mengunjungi Ternate,
29 Agustus 1957

Sumber: ANRI, Kempen 570829 vv 6

Perkebunan



Para pekerja di perkebunan coklat Ternate sedang mengupas buah coklat untuk diambil bijinya, tanpa tahun

Sumber: ANRI, Kempen 90514 vv 3



Barisan pohon cengkeh di perkebunan, Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, Kempen 90519 vv 6



Los tempat pembibitan pada Kebun Percobaan
Jawatan Pertanian Ternate,
4 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540604 vv 1-1

Bangunan



Sebuah kantor di tepi pantai Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 92/18



Rumah tinggal dengan arsitektur Belanda di Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 836/64 dan 836/66



Bangunan makam terletak di sebuah gua,
di Pulau Selayar Utara, Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 816/6



Grand Hotel Java, Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 148/89



Gedung tua peninggalan Belanda,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, RvD 90519 vv 5



Benteng pertahanan Belanda yang telah hancur,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, RvD 90519 vv 9



Kantor Pemerintahan di tepi Pelabuhan Ternate,
1931

Sumber: ANRI, KIT 249/60



Rumah penduduk dengan latar belakang
Gunung Api Gamalama,
1931

Sumber: ANRI, KIT 148/45



Salah satu sisi bangunan Kesultanan Ternate
diabadikan oleh Presiden Soekarno,
17 November 1951

Sumber: ANRI, 511117 vv 10



Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga
di Tugu Kemerdekaan Ternate,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 46



Studio Radio Republik Indonesia Ternate,
1 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540601 vv 1



Rumah Sosial Budi Santausa di Ternate yang dibangun 1953,
1 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540601 V V 1-3



Rumah penduduk di wilayah Ternate,
3 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540603 vv 2-1



Benteng peninggalan VOC dengan meriam mengarah ke pantai,
3 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540603 vv 16



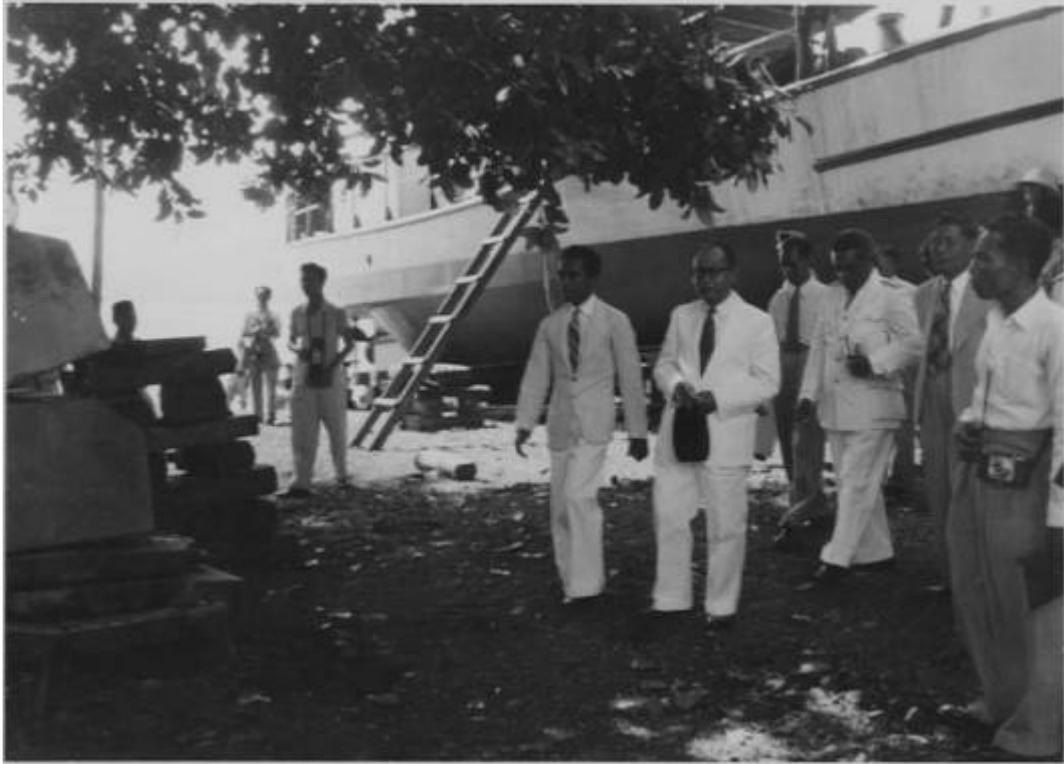
Suasana perumahan penduduk Ternate,
4 Juni 1954

Sumber: ANRI, 540605 vv 1



Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah melihat maket rencana pembangunan dermaga Pelabuhan Ternate pada Pameran Perikanan Laut di Ternate, 15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 3



Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi
pusat pembuatan perahu tradisional di Ternate,
15 Oktober 1954

Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 7

Perhubungan



Dermaga Pelabuhan Ternate,
tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT148/57



Pemandangan pelabuhan Ternate,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 537/86



Dermaga kecil tempat sampan merapat dengan latar belakang
pulau Ternate yang terbakar karena letusan
Gunung Api Gamalama,
tanpa tahun

Sumber: ANRI, KIT 971/19



Suasana senja di pantai Ternate dengan perahu-perahu yang sedang berlabuh,
17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 58



Perahu tradisional Ternate digunakan untuk membawa Presiden Soekarno menuju Istana Kesultanan Ternate, 17 November 1951

Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 26



Suasana pagi hari di pantai Ternate,
2 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-1



Dua perahu motor tengah berlabuh di Dermaga Ternate
2 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-2



Suasana bongkar muat barang dari perahu motor
ke sampan kecil di Pelabuhan Ternate,
2 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-3



Seorang nelayan tengah menjala ikan dengan sampan kecil di
Pelabuhan Ternate,
2 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-13



Penjual kursi bambu di sepanjang pantai Ternate,
4 Juni 1954

Sumber: ANRI, Kempen 540604 vv 2-1

DAFTAR ARSIP CITRA TERNATE DALAM ARSIP

DAFTAR ARSIP

CITRA TERNATE DALAM ARSIP

A.GEOGRAFIS

1. Peta Pulau Hiri, Pulau Ternate, Pulau Maitara dan Pulau Tidore, 1944
Sumber: ANRI, No. 2859
2. Proses Verbal mengenai pernyataan bahwa Kepulauan Kajoa berada dibawah Pemerintahan Ternate, Juli 1889
Sumber: ANRI, Kontrak Ternate 362
3. Peta situasi jalan di wilayah Ternate, tahun 1931
Sumber: ANRI, KIT 988/77
4. Pemandangan dermaga Ternate dengan latar belakang Gunung Api Gamalama, tahun 1931
Sumber: ANRI, KIT 528/12 dan KIT 148/59
5. Pemandangan Pulau Maitara dari Ternate, 17 November 1951 dan 3 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 90519 vv 2, 540603 vv 2 dan 511117 vv53
6. Pemandangan di tepi Pantai Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 60
7. Pemandangan pantai Ternate dengan latar belakang deretan pohon kelapa, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 55
8. Hampanan teratai ditepi Telaga Laguna dengan latar belakang puncak Gunung Api Gamalama, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 51

9. Senja di tepi pantai Ternate, 25 Mei 1952
Sumber: ANRI, Kempen 520525 ww 113

B.KESULTANAN TERNATE

10. Dua orang pasukan pengawal Kesultanan Ternate sedang berjaga dengan senjata di tangan, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 453/86
11. Staf dan Korps Musik dari Kesultanan Ternate, tahun 1893
Sumber: ANRI, KIT 217/50
12. Profil prajurit Kesultanan Ternate, tahun 1893
Sumber: ANRI, KIT 1095/85
13. Sultan Ternate, Sultan Haji Muhammad Usman (1896-1904), 1901
Sumber: ANRI, KIT 270/54
14. Pintu gerbang Istana Kesultanan Ternate, tahun 1931
Sumber: ANRI, KIT 779/78 dan Kempen 90519 vv 11
15. Mr. Alex Cann juru kamera NIGIS (*Netherland Indies Government Information Service*) merekam kedatangan Sultan Ternate, Iskandar Mohammed Djabir Sjah XLVI. Tampak Putra Sultan Ternate turun dari pesawat diiringi Mayor de Mul, Dr.Ch.O. van Der Plas dan Mr. L. Mees, Juni 1945
Sumber: ANRI, NIGIS No. AV.90 0928-MS
16. Pertemuan Dr. H. J. Van Mook (Gubernur Jenderal Hindia Belanda) dan Sultan Ternate Iskandar Mohamed Djabir Sjah di Kamp Columbia, Australia, Juni 1945
Sumber: ANRI, NIGIS No. A 12792

17. Jamuan makan siang di mess Kamp Columbia, Australia.
Dari kiri ke kanan: Sultan Ternate, Iskandar Mohammed Djabir Sjah XLVI, Dr. H. J. Van Mook, Ds. NS. Bloom dan Dr. RE Smits, Juni 1945
Sumber: ANRI, NIGIS No. A 12814
18. Istana Kesultanan Ternate, tahun 1931 dan 1 Juni 1954
Sumber: ANRI, KIT 90519vv10 dan Kempen 540601 vv 1-1
19. Istana Kesultanan Ternate dengan latar belakang Gunung Api Gamalama, Tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 249/62 dan 148/63
20. Kompleks pemakaman Sultan Ternate, Tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 816/9
21. Perahu Sultan Ternate dalam keadaan rusak, 1931
Sumber: ANRI, KIT 542/54
22. Pemandangan di halaman Kesultanan Ternate pada saat kunjungan Presiden Soekarno, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 12
23. Presiden Soekarno berdoa bersama keluarga Sultan Ternate, pada kunjungan beliau ke Maluku, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 18
24. Presiden Soekarno di antara keluarga Sultan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 21

C. PEMERINTAHAN

25. Populasi penduduk di wilayah Residensi Ternate meliputi penduduk Cina, Makasar dan Eropa, 31 Desember 1850
Sumber: ANRI, Ternate 179
26. Fragmen Serah Terima Jabatan pengunduran diri Residen Ternate; J.H. Tobias dan pengangkatan C. Bosscher sebagai residen baru, 1853
Sumber: ANRI, Ambon No. 1513
27. Fragmen Laporan Singkat Residen Ternate kepada Gubernur Kepulauan Maluku di Ambon tentang kejadian-kejadian di Karesidenan Ternate selama bulan Juli 1858
Sumber: ANRI, Ambon No. 1509
28. Fragmen Laporan Umum Karesidenan Ternate tentang wilayah, kependudukan, kepolisian, pengairan, situasi, dinas pekerjaan umum, perikanan, perdagangan pelabuhan, perputaran uang, dan keagamaan, 1867
Sumber: ANRI, Ternate 162
29. Residen Ternate dan para pembesar setempat berfoto di depan rumah Residen Ternate, 31 Agustus 1893
Sumber: ANRI, KIT 217/48
30. Residen Ternate dan para pembesar setempat berfoto di depan rumah Residen Ternate, 31 Agustus 1893
Sumber: ANRI, KIT 217/48
31. Fragmen Akte Perjanjian Raja Muda Mohamad Djabir sebagai Sultan Ternate, antara lain akan menjalankan pemerintahan dan kesejahteraan negeri, 2 September 1929
Sumber: ANRI, Ternate 237

32. Residen Ternate, Raja Tafalgur sedang melakukan perjalanan dinas dengan perahu tradisional, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 451/66
33. Fragmen Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tanggal 10 Desember 1946 tentang Peraturan Pemilihan Dewan Kota Praja Ternate
Sumber: ANRI, Algemeene Secretarie No. 1336
34. Wakil Presiden Mohammad Hatta di tengah-tengah keluarga Kepala Daerah Ternate dalam rangka kunjungan kerja ke Ternate, 16 Maret 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511797
35. Suasana rapat raksasa di lapangan depan Istana Kesultanan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 33, 36 dan 59
36. Rombongan Presiden Soekarno tiba di Pelabuhan Ternate menuju ke Istana Kesultanan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 24
37. Wartawan dari perwakilan negara sahabat sedang beramah tamah dengan Presiden Soekarno di Istana Sultan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 16
38. Suasana rapat umum di Ternate yang dihadiri oleh para pejabat daerah dan para wartawan dari dalam dan luar negeri, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 6
39. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati beserta rombongan tiba di Pelabuhan Ternate, 17 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 20

40. Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati disambut oleh rakyat Ternate ketika tiba di Pelabuhan Ternate, 17 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 12
41. Sesaat setelah tiba di Pelabuhan Ternate, Presiden Soekarno disambut oleh masyarakat Ternate, 17 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 13
42. Sambutan rakyat di Dermaga Ternate saat Presiden Soekarno berkunjung, 18 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540718 vv 91
43. Menteri Penerangan Dr. F.L. Tobing memberikan semangat kepada rakyat Ternate dalam Rapat Umum di depan Istana Kesultanan Ternate, 17 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 9
44. Bung Tomo dari Biro Irian Barat berpidato Dalam rapat umum di Ternate, 17 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 11
45. Rombongan 4 menteri (Wakil Perdana Menteri I; Moh. Roem, Menteri Penerangan; Sudibjo, Menteri Dalam Negeri; Sunarjo dan Menteri Urusan Umum; H. Rusli Abdul Wahid) tiba di Pelabuhan Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 38
46. Menteri Penerangan Sudibjo sedang menjabat tangan dengan para pejabat Pamong Praja di Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 1-11
47. Ny. Mohammad Roem menjabat tangan dengan Istri Kepala Daerah Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 30

48. Fragmen Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku, 10 Agustus 1958
Sumber: ANRI, Setkab/Undang-Undang Darurat Nomor 23/1957
49. Fragmen Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku, 17 Juli 1958
Sumber: ANRI, Setkab/Undang-Undang Nomor 60/1958
50. Fragmen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, 20 April 1999
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
51. Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah Kota Ternate, 29 Maret 2000
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
52. Naskah Pelantikan Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili, 6 Mei 2000. dan 10 Agustus 2005
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.72-641 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Ternate Provinsi Maluku Utara, 1 Agustus 2005
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
54. Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili memberikan cinderamata kepada Duta Besar Portugal untuk Indonesia, Jose Manuel Santos Braga di Ternate, 29 Maret 2006
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate

55. Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili menerima ucapan selamat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Penyerahan Piala Adipura di Bali, 6 Juni 2007
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
56. Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili menerima ucapan selamat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Koperasi Sedunia ke-60 di Bali, 12 Juli 2007
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
57. Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Mangga Dua Utara, Jati Perumnas, Tabona, Bastiong Karance, Ngade, Salahudin, Sangaji Utara, Akehuda, Tubo dan Dorpedo di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, 9 Agustus 2007
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
58. Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate No. 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Batang Dua, 9 Agustus 2007
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
59. Fragmen Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Ternate Tengah, 9 Agustus 2007
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
60. Fragmen Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 289 Tahun 2008 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2008, 4 Juni 2008
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate
61. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Piala Adipura kepada Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili di Istana Negara, Jakarta, 5 Juni 2008
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate

62. Walikota Ternate Drs. Syamsir Andili dengan Piala Adipura di depan Istana Negara, 5 Juni 2008
Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Ternate

D. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

63. Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan para pejabat dari Angkatan Bersenjata dan Pengawal Kepresidenan ketika berkunjung ke Ternate, 16 Maret 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511792
64. Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan dalam kunjungannya ke Benteng Kesatuan 17 Agustus 1945 di Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 44
65. Presiden Soekarno memeriksa barisan kehormatan dalam kunjungannya di Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 45
66. Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga pada sebuah makam di Taman Makam Pahlawan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 47
67. Wakil Perdana Menteri I Mr. Moh. Roem disambut oleh para perwira Angkatan Darat sesaat tiba di Pelabuhan Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 1- 12
68. Ny. Herawati Diah dan Nn. Kartini Sastranegara bersama anak buah kapal Dradajat di rumah Kepala Daerah Ternate, 17 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 6
69. Presiden Soekarno tengah melihat-lihat mesin Kapal Drajat yang sedang berlayar di perairan Pantai Ternate, 18 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540718 vv 113

E. KEAGAMAAN

70. Masjid Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 148/65 dan 803/79
71. Masjid Tua di Pulau Makian wilayah Ternate, Tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 803/83
72. Kapal pengangkut rombongan jemaah ahi yang akan bertolak dari Pelabuhan Ternate, 2 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 1
73. Presiden Soekarno disambut oleh para alim ulama ketika berkunjung ke masjid Ternate, 29 Agustus 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570829 vv 16

F. KEBUDAYAAN

74. Para penari istana dengan busana kebesaran khas Kesultanan Ternate, 1930-an
Sumber: ANRI, KIT 1095 / 79
75. Penari istana Kesultanan Ternate tengah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sultan Ternate, 1930-an
Sumber: ANRI, KIT 92/16
76. Korps musik yang mengiringi para penari istana Kesultanan Ternate, 1930-an
Sumber: ANRI, KIT 92/80
77. Topi khas Ternate dengan bahan daun dan bermotif tradisional dengan ukiran tangan, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 868/61
78. Profil Laki-laki penduduk asli Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 451/6

79. Kotak ukiran dari kayu cendana sebagai cendera mata dari masyarakat Ternate kepada Gubernur Maluku Latuharhary, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 4
80. Profil putri Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, 511117 vv 15
81. Gadis-gadis Ternate sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan rombongan menteri yang akan bekunjung ke Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 1-1
82. Tarian Dana-dana yang diikuti oleh para tamu dalam acara ramah tamah menyambut kedatangan tamu kenegaraan di Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 35
83. Tari Gale-gale, tarian tradisional masyarakat Ternate, 29 Agustus 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570829 vv 1-3
84. Tari Soya-soya, tarian tradisional masyarakat Ternate, 30 Agustus 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570830 vv 2-10

G. PENDIDIKAN

85. Pawai Sekolah Kepandaian Putri di Ternate, 17 Juli 1957
Sumber: ANRI, Kempen 540717 vv 17
86. Pelajar putri Ternate menyematkan bunga kepada Presiden Soekarno ketika tiba di pelabuhan Ternate, 18 Juli 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540718 vv 124
87. Sematan bunga di dada Wakil Presiden Mohammad Hatta oleh pelajar putri ketika tiba di Ternate, 14 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541014 vv 3-16

88. Pelajar Sekolah Teknik Putra menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Ternate, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 1-3
89. Barisan pelajar Ternate membentuk pagar betis untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Ternate, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 1-8
90. Pawai pelajar SD Kenari Tinggi menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 1- 11
91. Wakil Presiden Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat IV Latihan S.G.B. jalan Busdiri di Ternate, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 5
92. Barisan pelajar SMEP Negeri Ternate melepas Wakil Presiden Mohammad Hatta meninggalkan Ternate, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 12
93. Seorang pelajar putri menyerahkan karangan bunga kepada Ny. Moh. Roem ketika tiba di Pelabuhan Ternate, 1 Juni 1956
Sumber: ANRI, Kempen 560601 vv 40
94. Presiden Soekarno berjabat tangan dengan seorang pelajar ketika mengunjungi Ternate, 29 Agustus 1957
Sumber: ANRI, Kempen 570829 vv 6

H. PERKEBUNAN

95. Fragmen Surat dari Residen Ternate kepada Gubernur Maluku tentang Peraturan eksploitasi kehutanan di wilayah Residensi Ternate, 25 September 1928
Sumber: ANRI, Binnenlands Bestuur 372
96. Para pekerja di perkebunan coklat Ternate sedang mengupas buah coklat untuk diambil bijinya, tanpa tahun
Sumber: ANRI, Kempen 90514 vv 3
97. Barisan pohon cengkeh di perkebunan cengkeh Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, Kempen 90519 vv 6
98. Los tempat pembibitan pada Kebun Percobaan Jawatan Pertanian Ternate, 4 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540604 vv 1-1

I. BANGUNAN

99. Sebuah kantor di tepi pantai Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 92/18
100. Rumah tinggal dengan arsitektur Belanda di Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 836/64 dan 836/66
101. Gua bangunan makam di Pulau Selayar Utara, Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 816/6
102. Grand Hotel Java, Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 148/89
103. Gedung tua penginggalan Belanda, tanpa tahun
Sumber: ANRI, RvD 90519 vv 5

104. Benteng pertahanan Belanda yang telah hancur, tanpa tahun,
Sumber: ANRI, RvD 90519 vv 9
105. Kantor Pemerintahan di tepi Pelabuhan Ternate, 1931
Sumber: ANRI, KIT 249/60
106. Rumah penduduk dengan latar belakang Gunung Api Gamalama, 1931
Sumber: ANRI, KIT 148/45
107. Salah satu sisi bangunan Kesultanan Ternate diabadikan oleh Presiden Soekarno, 17 November 1951
Sumber: ANRI, 511117 vv 10
108. Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga di Tugu Kemerdekaan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 46
109. Radio Republik Indonesia Studio Ternate, 1 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540601 vv 1
110. Rumah Sosial Budi Santausa yang dibangun 1953, 1 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540601 vv 1-3
111. Rumah penduduk di wilayah Ternate, 3 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540603 vv 2-1
112. Benteng peninggalan VOC dengan meriam mengarah ke pantai, 3 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540603 vv 16
113. Suasana perumahan penduduk Ternate, 4 Juni 1954
Sumber: ANRI, 540605 vv 1

114. Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah melihat maket rencana pembangunan Dermaga Pelabuhan Ternate pada Pameran Perikanan Laut di Ternate, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 3
115. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi pusat pembuatan perahu tradisional di Ternate, 15 Oktober 1954
Sumber: ANRI, Kempen 541015 vv 7

J. PERHUBUNGAN

116. Dermaga Pelabuhan Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT148/57
117. Pemandangan pelabuhan Ternate, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 537/86
118. Dermaga kecil tempat sampan merapat dengan latar belakang pulau Ternate yang terbakar karena letusan Gunung Api Gamalama, tanpa tahun
Sumber: ANRI, KIT 971/19
119. Suasana senja di pantai Ternate dengan perahu-perahu yang sedang berlabuh, 17 Nopember 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 58
120. Perahu tradisional Ternate digunakan untuk membawa Presiden Soekarno menuju Istana Kesultanan Ternate, 17 November 1951
Sumber: ANRI, Kempen 511117 vv 26
121. Suasana pagi hari di pantai Ternate, 2 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-1
122. Dua perahu motor tengah berlabuh di Dermaga Ternate 2 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-2

123. Suasana bongkar muat barang dari perahu motor ke sampan kecil di Pelabuhan Ternate, 2 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-3
124. Seorang nelayan tengah menjala ikan dengan sampan kecil di Pelabuhan Ternate, 2 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540602 vv 2-13
125. Penjual kursi bambu disepanjang pantai Ternate, 4 Juni 1954
Sumber: ANRI, Kempen 540604 vv 2-1

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Kota Ternate Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ternate dengan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.